

SURAT MASUK

KANTOR UPBU KELAS III LETUNG ANAMBAS 2026





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : IP.106/35/SDJ.HMU/2026
2026

Jakarta, 13 Januari

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pembaharuan Nama Personel *Civil Aviation Publication Team*
(CAPT) Tahun 2026

Yth. Periksa Daftar Terlampir

Mendasari Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-DJPU 197 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 178 Tahun 2023 tentang Tim Publikasi Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Publication Team*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, diperlukan pembaharuan Tim Publikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/ *Civil Aviation Publication Team* (CAPT) Tahun 2026.

Guna proses lanjut, masing-masing unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan nama pegawai untuk dimasukkan dalam Tim Publikasi Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Publication Team*) di maksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Direktorat : 2 (dua) orang pegawai;
2. Balai : 2 (dua) orang pegawai;
3. Otoritas Bandar Udara : 2 (dua) orang pegawai;
4. Unit Penyelenggara Bandar Udara : 2 (dua) orang pegawai; dan
5. Satuan Pelayanan Bandar Udara : 1 (satu) orang pegawai.

Daftar nama disampaikan kepada Kepala Bagian Humas dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui alamat email: humas.dgca@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Adytia, HP : 081241727361.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran I Surat Dinas
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : IP.106/35/SDJ.HMU/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

Yth.

1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Direktur Keamanan Penerbangan;
4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
5. Direktur Navigasi Penerbangan;
6. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
8. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
9. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
10. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
11. Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Lampiran II Surat Dinas
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : IP.106/35/SDJ.HMU/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

Format Isian

DAFTAR USULAN NAMA
CIVIL AVIATION PUBLICATION TEAM (CAPT)
DIREKTORAT/BALAI/OBU/UPBU.....

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	NO HP (WHATS APP)	JABATAN	KET
1	<u>XXXXXXXXXXXXX</u> NIP.....	0000-0000-0000	XXXXXXXXXXXXX	
2	<u>XXXXXXXXXXXXX</u> NIP.....	0000-0000-0000	XXXXXXXXXXXXX	

DAFTAR USULAN NAMA
CIVIL AVIATION PUBLICATION TEAM (CAPT)
SATPEL BANDAR UDARA.....

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	NO HP (WHATS APP)	JABATAN	KET
1	<u>XXXXXXXXXXXXX</u> NIP.....	0000-0000-0000	XXXXXXXXXXXXX	

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT
NO.8 JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : AJ.201/V/5/SKJ/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Dukungan Penyebaran Link
Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat
Pada Masa Lebaran 2026

Jakarta, 11 Januari 2026

Yth. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan analisis prakiraan pergerakan masyarakat pada masa Lebaran Tahun 2026, Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi akan melaksanakan survei dengan metode penyebaran kuesioner secara daring. Survei ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan termasuk masyarakat pengguna, sehingga hasil yang diperoleh dapat merefleksikan kondisi aktual serta menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk dapat membantu penyebarluasan tautan survei dimaksud melalui jejaring kerja dan kanal komunikasi resmi kepada masing-masing pegawai untuk menyebarkan minimal 3 (tiga) responden masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan partisipasi responden dapat lebih optimal sehingga kualitas data yang dihimpun menjadi semakin representatif.

Adapun instrumen survei yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tautan survei: https://lnk.kemenhub.go.id/Survei_Angleb_2026.
2. Flyer standar dan QR code dapat diunduh pada: <https://bit.ly/Angleb2026>.



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc
NIP. 197308081999031003

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : AJ.201/1/5/SKJ/2026
Tanggal : 22 Januari 2026

UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

1. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara;
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat;
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepri
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Jambi;
8. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Bengkulu;
9. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
10. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel;
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Babel
12. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten;
13. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat;
14. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah;
15. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Yogyakarta;
16. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur;
17. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
18. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTB
19. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT;
20. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
21. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
22. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah;
23. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kaltim;
24. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kaltara
25. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tenggara;
26. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan;
27. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
28. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;
29. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo;
30. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara;
31. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
32. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
33. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua;
34. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
35. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan penyeberangan Danau Toba;
36. Kepala Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi;

UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

37. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
38. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
39. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;

40. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
41. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
42. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Padang;
43. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Palembang;
44. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
45. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sulawesi Selatan;
46. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
47. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;

UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

48. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
49. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sabang;
50. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhok Seumawe;
51. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati;
52. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh;
53. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa;
54. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan;
55. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Singkil;
56. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang;
57. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang;
58. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh;
59. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
60. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan;
61. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Sibolga;
62. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung;
63. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tg. Balai Asahan;
64. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu;
65. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga;
66. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunung Sitoli;
67. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Beringin;
68. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu;
69. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa;
70. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Dalam / Nias;
71. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Tello;
72. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leidong;
73. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang;
74. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batahan;
75. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus;
76. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai;
77. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
78. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton;
79. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pekanbaru;
80. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Enok;
81. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku;
82. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis;
83. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-Api;
84. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang;
85. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan;
86. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung;

87. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan;
88. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
89. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang;
90. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
91. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;
92. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun;
93. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang;
94. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang;
95. Kepala Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban;
96. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban;
97. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa;
98. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dabo Singkep;
99. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang;
100. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur;
101. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur;
102. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siuban;
103. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut;
104. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap;
105. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku;
106. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak;
107. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Tungkal;
108. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang;
109. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara;
110. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
111. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang;
112. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Lumpur;
113. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam;
114. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan;
115. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok;
116. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar;
117. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai;
118. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Bengkulu / Pulau Baai;
119. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Linau Bintuhan;
120. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni – Enggano;
121. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
122. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bakauheni;
123. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala;
124. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung;
125. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai;
126. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji;
127. Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
128. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
129. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok;
130. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke;
131. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu;
132. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda;
133. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa;
134. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Tanjung Priok;
135. Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tanjung Priok;

136. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten;
137. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu;
138. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan;
139. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban;
140. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;
141. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu;
142. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu;
143. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran;
144. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang;
145. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas;
146. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Tanjung Intan;
147. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap;
148. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal;
149. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa;
150. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang;
151. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara;
152. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana;
153. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang;
154. Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;
155. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak;
156. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak;
157. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;
158. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi;
159. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget;
160. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo;
161. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan;
162. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta;
163. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean / Sangkapura;
164. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis;
165. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi;
166. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru;
167. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapeken;
168. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu;
169. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa;
170. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa;
171. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padang Bai;
172. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang;
173. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida;
174. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Gilimanuk;
175. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar;
176. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima;
177. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas;
178. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete;
179. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;
180. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pemenang;
181. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai;
182. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape;
183. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Kupang;
184. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang;

185. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi;
186. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Maumere / Laurentius Say;
187. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu;
188. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende;
189. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu;
190. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka;
191. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo;
192. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Reo;
193. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot;
194. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba;
195. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba'a;
196. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa;
197. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo;
198. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lewoleba;
199. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
200. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak;
201. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete;
202. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang;
203. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Padang Tikar;
204. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh;
205. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Batang;
206. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan;
207. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit;
208. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pulang Pisau;
209. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun;
210. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai;
211. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara;
212. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung;
213. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Segintung;
214. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin;
215. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;
216. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru – Batulicin;
217. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap;
218. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui;
219. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda;
220. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
221. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda;
222. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang;
223. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta;
224. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redep;
225. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanah Paser;
226. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Sangkulirang;
227. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja;
228. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Santan;
229. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Tarakan;
230. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan;
231. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tarakan;
232. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor;
233. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu;

234. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk;
235. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Bitung;
236. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung;
237. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung;
238. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado;
239. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna;
240. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane;
241. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau;
242. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki;
243. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang;
244. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amurang;
245. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan;
246. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo;
247. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek;
248. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang;
249. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta;
250. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mamuju;
251. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo;
252. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang-Belang;
253. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene;
254. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;
255. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Makassar;
256. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare – Pare;
257. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe;
258. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo;
259. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji;
260. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garongkong;
261. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba;
262. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa;
263. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto;
264. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pattiro Bajo;
265. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai;
266. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea;
267. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar;
268. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili;
269. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu;
270. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli – Toli;
271. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai;
272. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Parigi;
273. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas;
274. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok;
275. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana;
276. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonedale;
277. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pagimana;
278. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Poso;
279. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bunta;
280. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk;
281. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Kendari;
282. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari;

283. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bau – Bau;
284. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha;
285. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka;
286. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa;
287. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko;
288. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe;
289. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci;
290. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon;
291. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Tual;
292. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tual;
293. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon;
294. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bandanaire;
295. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu;
296. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki;
297. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual;
298. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Namlea;
299. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wonreli;
300. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bula;
301. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai;
302. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo;
303. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Geser;
304. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Namrole;
305. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Hatu Piru;
306. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
307. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo;
308. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang;
309. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sanana;
310. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli;
311. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba;
312. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda / Gebe;
313. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo;
314. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Soa Sio;
315. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Laiwui;
316. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Jayapura;
317. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Merauke;
318. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura;
319. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak;
320. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke;
321. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire;
322. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Serui;
323. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako;
324. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren;
325. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sarmi;
326. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade;
327. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Korido;
328. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Agats;
329. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong;
330. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong;
331. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari;

332. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fak – Fak;
333. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat;
334. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni;
335. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teminabuan;
336. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior;
337. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana;
338. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas;
339. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Oransbari;
340. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wini;
341. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saketa;
342. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sofifi;
343. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bungku;

UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

344. Kepala Kantor BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
345. Kepala Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
346. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
347. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
348. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
349. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
350. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
351. Kepala Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
352. Kepala Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
353. Kepala Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
354. Kepala Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
355. Kepala Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
356. Kepala Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
357. Kepala Kantor BLU UPBU Juwata – Tarakan;
358. Kepala Kantor UPBU Budiarto – Curug;
359. Kepala Kantor BLU UPBU Djalaluddin – Gorontalo;
360. Kepala Kantor BLU UPBU Mutiara – Palu;
361. Kepala Kantor BLU UPBU Kalimantan;
362. Kepala Kantor UPBU Halu Oleo Kendari;
363. Kepala Kantor UPBU Wamena;
364. Kepala Kantor UPBU Mopah;
365. Kepala Kantor UPBU Domine Eduard Osok – Sorong;
366. Kepala Kantor UPBU Cut Nyak Dhien;
367. Kepala Kantor UPBU Binaka – Gunung Sitoli;
368. Kepala Kantor UPBU Tebelian;
369. Kepala Kantor UPBU APT. Pranoto;
370. Kepala Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin;
371. Kepala Kantor UPBU Frans Seda – Maumere;
372. Kepala Kantor UPBU Umu Meheng Kunda – Waingapu;
373. Kepala Kantor UPBU Komodo Labuan Bajo;
374. Kepala Kantor UPBU H.H. Aroeboesman – Ende;
375. Kepala Kantor UPBU Lede Kalumbang;
376. Kepala Kantor UPBU Rahadi Osman – Ketapang;
377. Kepala Kantor UPBU Pangsuma Putussibau;
378. Kepala Kantor UPBU Iskandar Pangkalan Bun;

379. Kepala Kantor UPBU H. Asan – Sampit;
380. Kepala Kantor UPBU Gusti Sjamsir Alam;
381. Kepala Kantor UPBU Syukuran Aminuddin Amir;
382. Kepala Kantor UPBU Kasiguncu;
383. Kepala Kantor UPBU Babullah;
384. Kepala Kantor UPBU Douw Aturure;
385. Kepala Kantor UPBU Rendani;
386. Kepala Kantor UPBU Cakrabhuwana;
387. Kepala Kantor UPBU Tunggul Wulung;
388. Kepala Kantor UPBU Dewadaru;
389. Kepala Kantor UPBU Trunojoyo;
390. Kepala Kantor UPBU Rembele;
391. Kepala Kantor UPBU Cut Ali;
392. Kepala Kantor UPBU Lasikin;
393. Kepala Kantor UPBU Maimun Saleh;
394. Kepala Kantor UPBU Dr. Ferdinand Lumbantobing;
395. Kepala Kantor UPBU Lasondre;
396. Kepala Kantor UPBU Aek Godang;
397. Kepala Kantor UPBU Mentawai;
398. Kepala Kantor UPBU Japura;
399. Kepala Kantor UPBU Tuanku Tambusai;
400. Kepala Kantor UPBU Depati Parbo;
401. Kepala Kantor UPBU Muara Bungo;
402. Kepala Kantor UPBU Nangapinoh;
403. Kepala Kantor UPBU Haji Muhammad Sidik;
404. Kepala Kantor UPBU Tumba Samba;
405. Kepala Kantor UPBU Sanggu - Buntok;
406. Kepala Kantor UPBU Kuala Pembuang;
407. Kepala Kantor UPBU Kuala Kurun;
408. Kepala Kantor UPBU Kol. Robert Atty Bessing;
409. Kepala Kantor UPBU Melak;
410. Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan;
411. Kepala Kantor UPBU Yuwai Semaring;
412. Kepala Kantor UPBU Nunukan;
413. Kepala Kantor UPBU Long Ampung;
414. Kepala Kantor UPBU Data Dawai;
415. Kepala Kantor UPBU Naha;
416. Kepala Kantor UPBU Melongguane;
417. Kepala Kantor UPBU Sultan Bantilan;
418. Kepala Kantor UPBU Pogogul;
419. Kepala Kantor UPBU Toraja;
420. Kepala Kantor UPBU Seko;
421. Kepala Kantor UPBU Rampi;
422. Kepala Kantor UPBU Aeropala;
423. Kepala Kantor UPBU Andijemma;
424. Kepala Kantor UPBU Betoambari;
425. Kepala Kantor UPBU Sugimanuru;
426. Kepala Kantor UPBU Arung Palakka;
427. Kepala Kantor UPBU Bua;

428. Kepala Kantor UPBU Matahora;
429. Kepala Kantor UPBU Sangia Ni Bandera;
430. Kepala Kantor UPBU Bandaneira;
431. Kepala Kantor UPBU Dobo;
432. Kepala Kantor UPBU Mathilda Batlayeri;
433. Kepala Kantor UPBU Namniwel;
434. Kepala Kantor UPBU Karel Sadsuitubun;
435. Kepala Kantor UPBU Jhon Becker;
436. Kepala Kantor UPBU Larat;
437. Kepala Kantor UPBU Namrole;
438. Kepala Kantor UPBU Amahai;
439. Kepala Kantor UPBU Wahai;
440. Kepala Kantor UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin;
441. Kepala Kantor UPBU Frans Sales Lega;
442. Kepala Kantor UPBU Mali;
443. Kepala Kantor UPBU Gewayantana;
444. Kepala Kantor UPBU Soa;
445. Kepala Kantor UPBU A.A Bere Tallo;
446. Kepala Kantor UPBU DC Saudale;
447. Kepala Kantor UPBU Tardamu;
448. Kepala Kantor UPBU Wunopito;
449. Kepala Kantor UPBU Stevanus Rumbewas;
450. Kepala Kantor UPBU Tanah Merah;
451. Kepala Kantor UPBU Mararena;
452. Kepala Kantor UPBU Mindiptana;
453. Kepala Kantor UPBU Oksibil;
454. Kepala Kantor UPBU Enarotali;
455. Kepala Kantor UPBU Waghete;
456. Kepala Kantor UPBU Mulia;
457. Kepala Kantor UPBU Tiom;
458. Kepala Kantor UPBU Mozes Kilangin;
459. Kepala Kantor UPBU Kimam;
460. Kepala Kantor UPBU Kamur;
461. Kepala Kantor UPBU Bomakia;
462. Kepala Kantor UPBU Dabra;
463. Kepala Kantor UPBU Bokondini;
464. Kepala Kantor UPBU Kepi;
465. Kepala Kantor UPBU Okaba;
466. Kepala Kantor UPBU Moanamani;
467. Kepala Kantor UPBU Kokonao;
468. Kepala Kantor UPBU Numfor;
469. Kepala Kantor UPBU Karubaga;
470. Kepala Kantor UPBU Ewer;
471. Kepala Kantor UPBU Illu;
472. Kepala Kantor UPBU Bade;
473. Kepala Kantor UPBU Senggeh;
474. Kepala Kantor UPBU Batom;
475. Kepala Kantor UPBU Bilorai;
476. Kepala Kantor UPBU Ilaga;

477. Kepala Kantor UPBU Muko-Muko;
478. Kepala Kantor UPBU Osman Sadik;
479. Kepala Kantor UPBU Gamarmalamo;
480. Kepala Kantor UPBU Buli;
481. Kepala Kantor UPBU Kuabang;
482. Kepala Kantor UPBU Emalamo;
483. Kepala Kantor UPBU Pitu;
484. Kepala Kantor UPBU Dabo;
485. Kepala Kantor UPBU Ranai;
486. Kepala Kantor UPBU Raja Haji Abdullah-Sei Bati;
487. Kepala Kantor UPBU Siboru;
488. Kepala Kantor UPBU Bintuni;
489. Kepala Kantor UPBU Utarom;
490. Kepala Kantor UPBU Wasior;
491. Kepala Kantor UPBU Teminabuan;
492. Kepala Kantor UPBU Inanwatan;
493. Kepala Kantor UPBU Marinda;
494. Kepala Kantor UPBU Merdei;
495. Kepala Kantor UPBU Babo;
496. Kepala Kantor UPBU Kambuaya;
497. Kepala Kantor UPBU Kebar;
498. Kepala Kantor UPBU Ayawasi;
499. Kepala Kantor UPBU Tampa Padang;
500. Kepala Kantor UPBU Elelim;
501. Kepala Kantor UPBU Nop Goliat Dekai;
502. Kepala Kantor UPBU Kiwirok;
503. Kepala Kantor UPBU Akimuga;
504. Kepala Kantor UPBU Silampari;
505. Kepala Kantor UPBU Tojo Una-Una;
506. Kepala Kantor UPBU Malikussaleh;
507. Kepala Kantor UPBU Maratua;
508. Kepala Kantor UPBU Harun Thohir;
509. Kepala Kantor UPBU Morowali;
510. Kepala Kantor UPBU Letung;
511. Kepala Kantor UPBU Nusantara;

UPT di Lingkungan Badan PSDM Perhubungan

512. Direktur Penerbangan Indonesia Banyuwangi;
513. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah;
514. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
515. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
516. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
517. Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
518. Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP);
519. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
520. Kepala Balai Diklat Transportasi Laut;
521. Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
522. Direktur Politeknik Pelayaran Barombong;

- 523. Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara;
- 524. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;
- 525. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi;
- 526. Direktur Politeknik Pelayaran Sorong;
- 527. Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati;
- 528. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
- 529. Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya;
- 530. Direktur Politeknik Penerbangan Medan;
- 531. Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;
- 532. Direktur Politeknik Penerbangan Makassar;
- 533. Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura;
- 534. Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
- 535. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya;
- 536. Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
- 537. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug;
- 538. Direktur Politeknik Pelayaran Banten.



Sekretaris Jenderal,

Antoni Arif Priadi
Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc
NIP 197308081999031003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	Telepon : 3505550 – 3505006 (Sentral) Fax : 3505136 – 3505139 3507144 – 34833369	Email : djpu151@kemenhub.go.id Website : hubud.kemenhub.go.id
--	---	--

Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKPN dan LHKAN Tahun Pelaporan 2026 serta Pemutakhiran Data Kepegawaian Pada Aplikasi SIK dan SIASN

Jakarta, 19 Februari 2026

Yth. Daftar Terlampir.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KP.010/1/11/STJ/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Perihal Penyampaian Wajib LHKPN Tahun 2025 pada Periode Pelaporan Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.001/1/10/STJ/2026, tanggal 4 Februari 2026 Perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi SIK, Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKPN dan LHKAN Tahun Pelaporan 2026 serta Pemutakhiran Data Kepegawaian Pada Aplikasi SIK dan SIASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada:

Hari/Tanggal : 25 s.d. 27 Februari 2026
Waktu : 09.00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V
Zoom Meeting Id : 812 3840 9423
Passcode : LHK2026

Hari/Tanggal : 4 s.d. 6 Maret 2026
Waktu : 09.00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III
Zoom Meeting Id : 861 6388 3948
Passcode : LHK2026

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kelancaran dan tercapainya tujuan kegiatan, mohon pimpinan unit kerja dapat menugaskan pejabat/pegawai yang membidangi data kepegawaian dan bertindak sebagai admin tingkat UPT aplikasi kepegawaian untuk dapat hadir pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

Yth.

1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

DAFTAR UNIT KERJA DAN MEKANISME KEHADIRAN

No.	UNIT KERJA	MEKANISME KEHADIRAN	TEMPAT
1.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III	Hadir Fisik	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V
2.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V		
3.	Kantor UPBU Kelas I Haluoleo		
4.	Kantor UPBU Kelas I Mutiara Sis-AI Jufri		
5.	Kantor UPBU Kelas II Kasiguncu		
6.	Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir		
7.	Kantor UPBU Kelas II Tampa Padang		
8.	Kantor UPBU Kelas III Andi Jemma		
9.	Kantor UPBU Kelas III Arung Palakka		
10.	Kantor UPBU Kelas III Betoambari		
11.	Kantor UPBU Kelas III H. Aroepala		
12.	Kantor UPBU Kelas III Lagaligo		
13.	Kantor UPBU Kelas III Morowali		
14.	Kantor UPBU Kelas III Pogogul		
15.	Kantor UPBU Kelas III Rampi		
16.	Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera		
17.	Kantor UPBU Kelas III Seko		
18.	Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru		
19.	Kantor UPBU Kelas III Sultan Bantilan		
20.	Kantor UPBU Kelas III Tanjung Api		
21.	Kantor UPBU Kelas III Toraja		
22.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah IX	Hadir Virtual	
23.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII		
24.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah X		
25.	Kantor UPBU Kelas I Djalaluddin		
26.	Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard Osok		
27.	Kantor UPBU Kelas I Mopah		
28.	Kantor UPBU Kelas I Wamena		
29.	Kantor UPBU Kelas II Douw Aturure		
30.	Kantor UPBU Kelas II Karel Sadsuitubun		
31.	Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin		
32.	Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat		
33.	Kantor UPBU Kelas II Rendani		
34.	Kantor UPBU Kelas II Sultan Babullah		
35.	Kantor UPBU Kelas III Akimuga		
36.	Kantor UPBU Kelas III Amahai		
37.	Kantor UPBU Kelas III Ayawasi		
38.	Kantor UPBU Kelas III Babo		
39.	Kantor UPBU Kelas III Bade		
40.	Kantor UPBU Kelas III Bandaneira		
41.	Kantor UPBU Kelas III Batom		
42.	Kantor UPBU Kelas III Bilorai		
43.	Kantor UPBU Kelas III Bintuni		
44.	Kantor UPBU Kelas III Bokondini		
45.	Kantor UPBU Kelas III Bomakia		
46.	Kantor UPBU Kelas III Bone		
47.	Kantor UPBU Kelas III Buli		
48.	Kantor UPBU Kelas III Dabra		
49.	Kantor UPBU Kelas III Dobo		
50.	Kantor UPBU Kelas III Elelim		
51.	Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana		
52.	Kantor UPBU Kelas III Enarotali		
53.	Kantor UPBU Kelas III Ewer		
54.	Kantor UPBU Kelas III Gamar Malamo		
55.	Kantor UPBU Kelas III Ilaga		

No.	UNIT KERJA	MEKANISME KEHADIRAN	TEMPAT			
56.	Kantor UPBU Kelas III Illu					
57.	Kantor UPBU Kelas III Inanwatan					
58.	Kantor UPBU Kelas III John Becker					
59.	Kantor UPBU Kelas III Kambuaya					
60.	Kantor UPBU Kelas III Kamur					
61.	Kantor UPBU Kelas III Karubaga					
62.	Kantor UPBU Kelas III Kebar					
63.	Kantor UPBU Kelas III Kepi					
64.	Kantor UPBU Kelas III Kimam					
65.	Kantor UPBU Kelas III Kiwirok					
66.	Kantor UPBU Kelas III Kokonau					
67.	Kantor UPBU Kelas III Kuabang					
68.	Kantor UPBU Kelas III Larat					
69.	Kantor UPBU Kelas III Mararena					
70.	Kantor UPBU Kelas III Marinda					
71.	Kantor UPBU Kelas III Matahora					
72.	Kantor UPBU Kelas III Mathilda Batlayeri					
73.	Kantor UPBU Kelas III Melonguane					
74.	Kantor UPBU Kelas III Merdey					
75.	Kantor UPBU Kelas III Mindiptana					
76.	Kantor UPBU Kelas III Moanamani					
77.	Kantor UPBU Kelas III Mulia					
78.	Kantor UPBU Kelas III Naha					
79.	Kantor UPBU Kelas III Namlea					
80.	Kantor UPBU Kelas III Namniwel					
81.	Kantor UPBU Kelas III Namrole					
82.	Kantor UPBU Kelas III Numfor					
83.	Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik					
84.	Kantor UPBU Kelas III Okaba					
85.	Kantor UPBU Kelas III Oksibil					
86.	Kantor UPBU Kelas III Pitu					
87.	Kantor UPBU Kelas III Pongtiku					
88.	Kantor UPBU Kelas III Senggeh					
89.	Kantor UPBU Kelas III Siboru					
90.	Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas					
91.	Kantor UPBU Kelas III Sudjarwo Tjondronegoro					
92.	Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah					
93.	Kantor UPBU Kelas III Teminabuan					
94.	Kantor UPBU Kelas III Tiom					
95.	Kantor UPBU Kelas III Torea					
96.	Kantor UPBU Kelas III Utarom					
97.	Kantor UPBU Kelas III Waghete					
98.	Kantor UPBU Kelas III Wahai					
99.	Kantor UPBU Kelas III Wasior					
100.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I			Hadir Fisik	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III	
101.	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan					
102.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV					
103.	Balai Kesehatan Penerbangan					
104.	Balai Teknik Penerbangan					
105.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VII					
106.	Kantor UPBU Kelas I Budiarto					
107.	Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana					
108.	Kantor UPBU Kelas III Dewa Daru					
109.	Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir					
110.	Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo					
111.	Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung					
112.	Direktorat Angkutan Udara			Hadir Virtual		
113.	Direktorat Bandar Udara					
114.	Direktorat Keamanan Penerbangan					
115.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara					
116.	Direktorat Navigasi Penerbangan					
117.	Bagian Sumber Daya Manusia					
118.	Bagian Perencanaan					

No.	UNIT KERJA	MEKANISME KEHADIRAN	TEMPAT
119.	Bagian Keuangan		
120.	Bagian Hukum dan Kerja Sama		
121.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana		
122.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum		
123.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II		
124.	Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata		
125.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI		
126.	Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto		
127.	Kantor UPBU Kelas I Kalimantan		
128.	Kantor UPBU Khusus Ibu Kota Nusantara		
129.	Kantor UPBU Kelas II Binaka		
130.	Kantor UPBU Kelas II Cut Nyak Dhien		
131.	Kantor UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda		
132.	Kantor UPBU Kelas II Gusti Sjamsir Alam		
133.	Kantor UPBU Kelas II H. Asan		
134.	Kantor UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman		
135.	Kantor UPBU Kelas II Iskandar		
136.	Kantor UPBU Kelas II Komodo		
137.	Kantor UPBU Kelas II Lede Kalumbang		
138.	Kantor UPBU Kelas II Pangsuma		
139.	Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman		
140.	Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin		
141.	Kantor UPBU Kelas II Tebelian		
142.	Kantor UPBU Kelas II Uumbu Meheng Kunda		
143.	Kantor UPBU Kelas III A.A Bere Tallo		
144.	Kantor UPBU Kelas III Aek Godang		
145.	Kantor UPBU Kelas III Beringin		
146.	Kantor UPBU Kelas III Dabo		
147.	Kantor UPBU Kelas III Datar Dawai		
148.	Kantor UPBU Kelas III David Constantijn Saudale		
149.	Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo		
150.	Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumbantobing		
151.	Kantor UPBU Kelas III FL Tobing		
152.	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega		
153.	Kantor UPBU Kelas III Gewayantana		
154.	Kantor UPBU Kelas III Haji Muhammad Sidik		
155.	Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik		
156.	Kantor UPBU Kelas III Japura		
157.	Kantor UPBU Kelas III Kol. Robert Atty Bessing		
158.	Kantor UPBU Kelas III Kuala Kurun		
159.	Kantor UPBU Kelas III Kuala Pembuang		
160.	Kantor UPBU Kelas III Lasikin		
161.	Kantor UPBU Kelas III Lasondre		
162.	Kantor UPBU Kelas III Letung		
163.	Kantor UPBU Kelas III Long Apung		
164.	Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh		
165.	Kantor UPBU Kelas III Mali		
166.	Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh		
167.	Kantor UPBU Kelas III Maratua		
168.	Kantor UPBU Kelas III Melak		
169.	Kantor UPBU Kelas III Mentawai		
170.	Kantor UPBU Kelas III Muara Bungo		
171.	Kantor UPBU Kelas III Muko-Muko		
172.	Kantor UPBU Kelas III Nangapinoh		
173.	Kantor UPBU Kelas III Nunukan		
174.	Kantor UPBU Kelas III Pasir Pangaraian		
175.	Kantor UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah		
176.	Kantor UPBU Kelas III Ranai		
177.	Kantor UPBU Kelas III Rembele		
178.	Kantor UPBU Kelas III Rokot		
179.	Kantor UPBU Kelas III Sanggu		
180.	Kantor UPBU Kelas III Seluwing		
181.	Kantor UPBU Kelas III Silampari		
182.	Kantor UPBU Kelas III Soa		

No.	UNIT KERJA	MEKANISME KEHADIRAN	TEMPAT
183.	Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin		
184.	Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan		
185.	Kantor UPBU Kelas III Tardamu		
186.	Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali		
187.	Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai		
188.	Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba		
189.	Kantor UPBU Kelas III Wunopito		
190.	Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring		

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran III Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

**SUSUNAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN LHKPN DAN
LHKAN TAHUN PELAPORAN 2026 SERTA PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN
PADA APLIKASI SIK DAN SIASN**

WAKTU SETEMPAT	KEGIATAN	KETERANGAN
Hari Pertama		
08.00 – 21.00	Persiapan panitia dan registrasi peserta	Bagian Sumber Daya Manusia
Hari Kedua		
09.00 – 09.15	Laporan Kegiatan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Unit Kerja Hadir Fisik dan Virtual
09.15 – 09.30	Sambutan Pembukaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Unit Kerja Hadir Fisik dan Virtual
09.30 – 09.45	Break	Unit Kerja Hadir Fisik dan Virtual
09.45 – 11.30	Paparan terkait LHKPN dan LHKAN Tahun Pelaporan 2026	Unit Kerja Hadir Fisik dan Virtual
11.30 – 13.00	- Break - Shalat	Unit Kerja Hadir Fisik dan Virtual
13.00 – 15.00	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIK dan SIASN	Unit Kerja Hadir Fisik
15.00 – 16.00	Break	Unit Kerja Hadir Fisik
16.00 – 17.30	Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIK dan SIASN	Unit Kerja Hadir Fisik
17.30 – 19.00	- Break - Buka Puasa	Unit Kerja Hadir Fisik
19.00 – 21.00	Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIK dan SIASN	Unit Kerja Hadir Fisik
Hari Ketiga		
08.00 – 21.00	- Evaluasi Kegiatan - Penyusunan Laporan Kegiatan	Bagian Sumber Daya Manusia

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.004/171/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 25 Februari 2026
Sifat : **BIASA**
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Penyusunan Peta Proses Bisnis di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.207/103/SDJ.OTL/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, disampaikan bahwa telah diselenggarakan acara dimaksud pada tanggal 9 - 11 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB s.d. selesai secara *hybrid* dan dihadiri perwakilan seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan mohon unit kerja dapat mempersiapkan data dukung untuk tindak lanjut dalam upaya percepatan penyusunan peta Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang lengkap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : UM.004/171/SDJ.OTL/2026

Tanggal : 25 Februari 2026

- Yth.
1. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Balai;
 4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 5. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : UM.004/171/SDJ.OTL/2026

Tanggal : 25 Februari 2026

**LAPORAN PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

I. DASAR

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.207/103/SDJ.OTL/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

II. PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Senin - Rabu / 9 - 11 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Pimpinan Rapat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tempat : **Luring**
Hotel Grand Sahid Jaya
Daring melalui Aplikasi Zoom Meeting
ID: 850 8527 1100 *Passcode: Ortala1#*

III. PESERTA

Rapat ini dilaksanakan secara *hybrid* dan dihadiri oleh perwakilan dari :

Hadir Luring:

1. Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Direktorat Angutan Udara;
4. Direktorat Bandar Udara;
5. Direktorat Keamanan Penerbangan;
6. Direktorat Navigasi Penerbangan;
7. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
8. Bagian Perencanaan;
9. Bagian Keuangan;
10. Bagian Sumber Daya Manusia;
11. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
12. Bagian Hukum dan Kerja Sama; dan
13. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum;

Hadir Daring (online):

1. Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
3. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Balai Kesehatan Penerbangan; dan
5. Balai Teknik Penerbangan.

IV. PEMBAHASAN

1. Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan menyampaikan beberapa hal penting antara lain:
 - a. Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis penyusunan proses bisnis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama antar unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap peta proses bisnis hingga dapat diturunkan menjadi prosedur kerja (SOP) pada masing-masing unit kerja.
 - b. Desain proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar mengacu pada peraturan, antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - 2) PM 53 Tahun 2023 Tentang Probis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 3) KM 8 Tahun 2024 Tentang Peta Proses, Peta Subproses dan Peta Relasi di Kementerian Perhubungan.
 - c. Acara ini juga ditargetkan dapat menyempurnakan peta proses bisnis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah disusun dan saat ini sedang dilakukan reviu dan proses penetapan oleh tim dari Biro SDMO.
 - d. Untuk Proses bisnis tingkat Unit Pelaksana Teknis perlu dilakukan kesepakatan mengingat karakter tugas dan fungsi UPT di DJPU berbeda-beda, sebagai contoh proses bisnis di lingkungan kantor otoritas bandar udara telah tergambar sebagai bagian dari proses bisnis pada Direktorat, sedangkan untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara belum dapat dijelaskan dengan peta Sub Proses level maupun peta lintas fungsi pada Direktorat.
 - e. Mengharapkan para narasumber dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai proses bisnis serta contoh-contoh praktik baik dalam penyusunan bisnis proses hingga menjadi SOP yang mudah dipahami dan menyeluruh untuk setiap level organisasi.
2. Selanjutnya pemaparan dan pengarahan dari Bapak Mas Pungky Hendrawijaya selaku Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Perekonomian, Infrastruktur dan Pemerintah Daerah Wilayah II, Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB, antara lain:
 - a. Penyusunan proses bisnis (probis) berpedoman pada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam menciptakan alur kerja yang terstruktur, transparan, dan terdokumentasi secara akuntabel;
 - b. Proses bisnis tidak dapat dirancang secara parsial atau tersekat, melainkan harus mendorong sinergi dan keterpaduan antar instansi. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor serta transformasi menyeluruh pada aspek struktur, budaya kerja, dan sistem pelayanan publik;
 - c. Probis harus dirancang dengan prinsip efisiensi menjadi kunci utama melalui optimalisasi setiap tahapan proses, penghapusan duplikasi fungsi, serta minimalisasi pemborosan sumber daya;
 - d. Diperlukan perhatian khusus terhadap aspek penyederhanaan birokrasi. Proses bisnis yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami akan memitigasi hambatan kinerja organisasi sehingga implementasi di lapangan menjadi lebih efektif dan kualitas layanan meningkat;
 - e. Penetapan proses bisnis yang terstandar tidak sekadar bertujuan menghasilkan dokumen administratif formal. Fokus utamanya adalah mendorong implementasi yang konsisten dan berkualitas demi tercapainya peningkatan kinerja pemerintahan serta keberhasilan reformasi birokrasi secara nyata.

3. Selanjutnya pemaparan narasumber Ibu Ericha dari Kedeputan Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB, antara lain:
 - a. Penyusunan proses bisnis dimulai dengan identifikasi mandat, dasar hukum, serta penyelarasan dengan dokumen penunjang strategis seperti Rencana Strategis (Renstra). Struktur proses bisnis terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu proses inti, proses pendukung dan manajemen, serta proses lainnya;
 - b. Kunci utama penyusunan proses bisnis terletak pada perubahan pola pikir yang berorientasi pada hasil, berpikir sistemik, fokus pada dampak, pemberian nilai tambah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Setiap proses bisnis yang disusun harus dievaluasi fungsinya dalam mempermudah pelaksanaan pekerjaan, apabila ditemukan proses yang menghambat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - d. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional mewajibkan setiap kementerian menggunakan model *Business Process Model and Notation* (BPMN) dalam menyusun alur proses bisnis;
 - e. Sebuah Lembaga tingkat Kementerian idealnya memiliki satu kesatuan proses bisnis induk yang diturunkan hingga level n. sehingga keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diposisikan sebagai aktor pada proses lintas fungsi (*Cross Functional Map/CFM*) dan cukup menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP);
 - f. Saat ini setiap Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan terlihat memiliki proses bisnis masing-masing karena menjalankan mandat undang-undang yang berbeda. Dalam konteks ini Proses Bisnis pada Level 0 wajib mengakomodasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh entitas di bawahnya secara komprehensif;
 - g. Dalam proses audit, instansi cukup menunjukkan satu kesatuan proses bisnis milik kementerian serta menjelaskan peran dan keterlibatan setiap unit kerja di dalam proses tersebut;
 - h. Untuk menjawab kebutuhan manajemen risiko, instansi dapat menunjukkan SOP Makro sebagai rujukan pelaksanaan;
 - i. Tingkat kedalaman atau rincian suatu proses bisnis ditentukan berdasarkan sejauh mana koordinasi kegiatan antarunit kerja terlihat secara jelas.
4. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, perwakilan Bagian Perencanaan memberikan masukan antara lain:
 - a. Penyusunan manajemen risiko wajib didasarkan pada proses bisnis yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam KM 69 Tahun 2024;
 - b. Terdapat catatan dari Inspektorat Jenderal mengenai belum tersedianya dokumen proses bisnis pada unit kerja (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU);
 - c. Berdasarkan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setiap organisasi diharuskan memiliki proses bisnis sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasionalnya. Apabila belum tersedia peta proses bisnis yang lengkap maka penilaian risiko dapat lebih dulu dibuat dengan menggunakan RO/KRO (Rincian Output / Klasifikasi Rincian Output);
 - d. Diperlukan penyamaan persepsi mengenai definisi proses bisnis di tingkat internal, mengingat selama ini Bagian Perencanaan masih mengidentifikasi *Cross Functional Map* (CFM) sebagai keseluruhan proses bisnis.
5. Selanjutnya pemaparan narasumber Ibu Budyastuti dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026, antara lain:
 - a. Pada peta proses bisnis Kementerian Perhubungan, Struktur HUB Kemenhub terdapat 13 HUB utama, di mana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)

- berfokus pada HUB-06 (Pelayanan Transportasi), HUB-07 (Pengelolaan Keselamatan & Keamanan Transportasi), HUB-08 (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi), dan HUB-09 (Aksesibilitas dan Konektivitas Transportasi).
- b. Peta Level 1 & 2 merupakan turunan detail dari Level 0 yang melibatkan unit kerja spesifik, seperti HUB-06.03 (Pelayanan Transportasi Udara) memiliki 6 sub-proses level 2, termasuk pelayanan personel, sarana, prasarana, organisasi, operasional, dan kebijakan.
 - c. Peta Proses bisnis dapat difahami merupakan proses bisnis level 0, level 1 hingga level ke-n, serta peta lintas fungsi. Sehingga apabila belum menggambarkan hingga fungsi Unit Pelaksana Teknis maka perlu ditinjau ulang ruang lingkup proses bisnis yang telah disusun.
 - d. Proses penyusunan SOP dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai berikut:
 - 1) Menunjuk personel yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman relevan di bidangnya;
 - 2) Melakukan penelaahan terhadap tugas pokok, fungsi, serta wewenang pada setiap unit kerja;
 - 3) Mengumpulkan data secara mendalam melalui metode wawancara, observasi lapangan, dan analisis alur kerja;
 - 4) Membuat diagram alur (*flowchart*) yang selaras dengan uraian prosedur dan langkah-langkah kegiatan;
 - 5) Melakukan revidi atas draf dokumen untuk kemudian ditetapkan secara resmi oleh pimpinan unit kerja.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan dan diskusi terhadap keberadaan proses bisnis di lingkungan DJPU, antara lain:

1. Peta Proses Bisnis merupakan satu kesatuan rangkaian yang terdiri atas Peta Proses, Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (*Cross-Functional Map/CFM*) dari Level 0 hingga Level n.
2. Dalam peta Proses Bisnis, UPT berperan sebagai aktor pada proses lintas fungsi sehingga memberikan dukungan pada suatu fungsi pada Peta Lintas Fungsi (CFM) dan dapat diturunkan menjadi SOP.
3. Peta Lintas Fungsi (CFM) disusun apabila terdapat hubungan tata kerja yang melibatkan lebih dari dua unit organisasi. Satu dokumen CFM bersifat lintas unit, sehingga tidak hanya merepresentasikan atau dimiliki oleh satu unit kerja saja.
4. Peta Proses Bisnis ditetapkan secara terpusat pada tingkat Kementerian. Oleh karena itu, unit kerja pada tingkat Eselon I ke bawah tidak perlu melakukan penetapan Proses Bisnis secara mandiri.
5. Unit kerja yang menjalankan fungsi kesekretariatan, baik Sekretariat Direktorat Jenderal maupun di Bagian/ Subbagian Tata Usaha) di UPT, tidak perlu menyusun CFM mandiri. Unit tersebut cukup mengacu pada CFM Sekretariat Jenderal dan dapat langsung menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
6. Unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) agar melakukan peninjauan (*review*) terhadap CFM Sekretariat Jenderal yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BLU. Apabila terdapat layanan atau tugas fungsi yang belum terakomodasi dalam CFM tersebut, unit kerja agar menginformasikannya kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

7. Saat ini, Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) telah disusun hingga tingkatan Level 0, Level 1, Level 2, serta Peta Lintas Fungsi untuk Kantor Pusat. Sebagai langkah tindak lanjut guna mewujudkan Proses Bisnis yang komprehensif, perlu segera disusun Peta Lintas Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DJPU.
8. Mekanisme penyusunan Peta Lintas Fungsi (*Cross-Functional Map/CFM*) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Bimbingan Teknis
 - 1) Sosialisasi penyusunan Proses Bisnis (Probis);
 - 2) Penjelasan mekanisme penyusunan Peta Lintas Fungsi (CFM);
 - 3) Pengumpulan data dukung yang diperlukan.
 - b. Asistensi
 - 1) Pendalaman informasi (dilakukan selama proses penyusunan CFM);
 - 2) Penyusunan CFM secara teknis;
 - 3) Pemetaan (*leveling*) serta penomoran dokumen CFM.
 - c. Finalisasi
 - 1) Finalisasi Peta Lintas Fungsi (CFM) dengan melibatkan Biro SDMO.
 - 2) Penyampaian usulan dokumen kepada Biro SDMO.
 - 3) Penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal (apabila diperlukan untuk kebutuhan spesifik).
9. Unit kerja yang ditetapkan sebagai sampel dalam penyusunan ini adalah:
 - a. Kantor UPBU:
 - 1) Kelas I Utama: Kantor UPBU Juwata Tarakan
 - 2) Kelas I: Kantor UPBU Kalimantan dan/atau Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri
 - 3) Kelas II: Kantor UPBU Komodo dan/atau Kantor UPBU Binaka dan/atau Kantor UPBU Timika
 - 4) Kelas III: Kantor UPBU Harun Thohir dan/atau Kantor UPBU Dewadaru dan/atau Satuan Pelayanan BU Ngloram.
 - b. Kantor OBU:
 - 1) Kelas Utama: Kantor OBU Wilayah I
 - 2) Kelas I: Kantor OBU Wilayah IV
 - 3) Kelas II: Kantor OBU Wilayah VII
 - c. Balai – Balai:
 - 1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
 - 2) Balai Kesehatan Penerbangan
 - 3) Balai Teknik Penerbangan
10. Penyusunan Peta Lintas Fungsi untuk Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) akan diselenggarakan dengan rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 serta disinkronkan dengan Peta Lintas Fungsi Kantor Pusat karena adanya irisan dan keterkaitan tugas dan fungsi.
11. Untuk Balai Teknik Penerbangan dan Balai Kesehatan Penerbangan yang telah menyusun Peta Lintas Fungsi, agar melakukan peninjauan ulang (*review*). Apabila terdapat perubahan, hasil tinjauan tersebut agar disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk dilakukan proses finalisasi.

VI. TINDAK LANJUT

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan menyusun Peta Lintas Fungsi (CFM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tetap melibatkan unit kerja terkait dalam proses penyusunannya.
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap Peta Lintas Fungsi Kantor Pusat yang telah disusun sebelumnya.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan menjadi sampel agar memberikan data dukung yang diperlukan dalam penyusunan Peta Lintas Fungsi, yang meliputi:
 - a. Struktur organisasi unit kerja;
 - b. Tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - c. Rencana Strategis (Renstra) unit kerja;
 - d. SDM yang memahami ruang lingkup tugas fungsi, serta penunjukan satu orang PIC bagi unit kerja yang terpilih sebagai sampel;
 - e. Daftar dan dokumen SOP masing-masing unit kerja;
 - f. Dokumen Peta Lintas Fungsi bagi unit kerja yang telah memilikinya;
 - g. Uraian kegiatan yang selaras dengan rencana judul Peta Lintas Fungsi (bagi unit kerja terkait).
4. Seluruh dokumen data dukung tersebut di atas agar diunggah melalui tautan **bit.ly/ProsesBisnisDJPU** paling lambat pada tanggal **6 Maret 2026** untuk dilakukan penelaahan atau penyusunan desain penyempurnaan proses bisnis.

Jakarta, 24 Februari 2026

Ketua Tim

Organisasi dan Kompetensi Jabatan



Khoironi, S.T., M.T.
NIP. 197605172006041001

Penyusun Laporan,



Ni Wayan Nindya Vrischikadevi, A.Md.
NIP. 200006242022102002

Mengetahui,

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Merosa Dwi Diayanti, S.Kom., M.T.
NIP. 197303021998032001

DOKUMENTASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 350550 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505136 - 3505139
3507144 - 34833369

Nomor : UM.207/22/SDJ.REN/III/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persiapan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026

Jakarta, 6 Maret 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, hasil kegiatan Evaluasi Implementasi dan Penyusunan Laporan Triwulan IV Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan nomor: 35/REN/ND/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Upaya Peningkatan Kualitas Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2026, maka disampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan koordinasi, penajaman dan penyelarasan sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 9 – 12 Maret 2026
Waktu : Jadwal terlampir
Zoom Meeting : Meeting ID: 863 3689 3588 Passcode: MR2026
Tempat : Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta
Jl. Hayam Wuruk No.36 37, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120
Acara : Persiapan Penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026
Jadwal : Terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Kepada Yth :

Luring :

- **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**
Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, BPKP;
- **Kementerian Perhubungan RI**
 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
 2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Daring :

1. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

JADWAL ACARA
PERSIAPAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2026

HARI/ TANGGAL	WAKTU (WIB)	ACARA	Keterangan
Senin, 9 Maret 2026	08.00 – 08.30	Registrasi	
	08.30 – 09.00	Pembukaan - Sambutan Sesditjen Perhubungan Udara / Pejabat yang mewakili	
	09.00 – 11.00	Paparan terkait penyelenggaraan MR dengan narasumber : - BPKP - Biro Perencanaan Kemenhub RI - Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
	11.00 – 12.00	Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan	
	12.00 – 13.00	Istirahat	
	13.00 – 17.00	Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan	
	17.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan	
Selasa, 10 Maret 2026	08.00 – 09.00	Registrasi	
	09.00 – 12.00	Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara	
	12.00 – 13.00	Istirahat	
	13.00 – 17.00	Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara	
	17.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara	
Rabu, 11 Maret 2026	08.00 – 09.00	Registrasi	
	09.00 – 11.30	Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Papua dan Kantor Pusat	
	11.30 – 13.00	Istirahat	
	13.00 – 17.00	Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Papua dan Kantor Pusat	
	17.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026 Wilayah Papua dan Kantor Pusat	
Kamis, 12 Maret 2026	09.00 – 12.00	Penyusunan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun 2026	
	12.00 – 13.00	Check-out	

Catatan :

- Jadwal acara dapat berubah sewaktu waktu.
- Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Ibu Sherly Selvianita (081210001302) dan Ibu Nurainun (081317715662)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.007/224/SDJ.SDM/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jakarta, 11 Maret 2026

Yth. **Daftar Nama Terlampir**

Mendasari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam rangka hal dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang akan dilaksanakan secara tatap muka dan virtual pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Pukul : 09:00 WIB – selesai
Pengambil Sumpah : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tempat : - **Tatap Muka**
Ruang Rapat Mulawarman, Gedung Karsa
Kementerian Perhubungan
: - **Virtual**
ID Meeting : 84880367531
Passcode : sumpahpns2026
Pakaian : Pakaian Korpri + Peci Hitam

Dapat disampaikan bahwa jumlah peserta pengambilan sumpah sebanyak 709 orang yang terdiri dari 12 orang hadir secara fisik dan 697 orang hadir secara virtual (terlampir dalam <https://tinyurl.com/pesertasumpahpns2026>).

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut, mohon kiranya kepada Kepala Unit Kerja agar dapat memberikan ijin dan menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji PNS.

Untuk kelancaran acara, dimohon agar peserta sumpah hadir 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan kegiatan. **Bagi pegawai yang disumpah secara virtual wajib memegang kitab suci sesuai dengan agama masing-masing.** Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Miko (082112110221), Mahfur (081287374286), Johan (081252324086), Tonny (081315384221), Naufal (081117797665), Hafiz (081212265922).

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.007/224/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

Kepadar Yth :

1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Keamanan Penerbangan;
3. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I;
5. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah IX;
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VII;
13. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII;
14. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah X;
15. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
16. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto;
17. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah;
18. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Wamena;
19. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan;
20. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Binaka;
21. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Cut Nyak Dhien;
22. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Douw Aturure;
23. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Fransiskus Xaverius Seda;
24. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Gusti Sjamsir Alam;
25. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II H. Asan;
26. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II H. Hasan Aroeboesman;
27. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Iskandar;
28. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Karel Sadsuitubun;
29. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu;
30. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo;
31. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Lede Kalumbang;
32. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Mozes Kilangin;
33. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Nop Goliat Dekai;
34. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Pangsuma;
35. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rahadi Osman;
36. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani - Manokwari;
37. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin;
38. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Syukuran Aminuddin Amir;
39. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tampa Padang;
40. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tebelian;
41. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Umu Meheng Kunda;
42. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III A.A Bere Tallo;
43. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Aek Godang;

44. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Akimuga;
45. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Amahai;
46. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Andi Jemma;
47. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Arung Palakka;
48. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ayawasi;
49. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo;
50. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bade;
51. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bandaneira;
52. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Batom;
53. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari;
54. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bilorai;
55. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bintuni;
56. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bokondini;
57. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bomakia;
58. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Buli;
59. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Cakrabhuwana;
60. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
61. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabra;
62. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai;
63. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III David Constantijn Saudale;
64. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Depati Parbo;
65. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dewa Daru;
66. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dobo;
67. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dr. Ferdinand Lumban;
68. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Elelim;
69. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Emalamo Sanana;
70. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali;
71. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer;
72. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Frans Sales Lega;
73. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Gamar Malamo;
74. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Gewayantana;
75. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III H. Aroepala;
76. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Haji Muhammad Sidik;
77. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir;
78. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Illu;
79. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Inanwatan;
80. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Japura;
81. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III John Becker;
82. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kambuaya;
83. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kamur;
84. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kebar;
85. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kapi;
86. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimam;
87. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kokonau;
88. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kol. Robert Atty Bessing;
89. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kuabang;
90. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kuala Kurun;
91. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kuala Pembuang;
92. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo;
93. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lasikin;
94. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lasondre;
95. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung;
96. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Long Apung;

97. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Maimun Saleh;
98. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali;
99. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Malikussaleh;
100. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mararena;
101. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Marinda;
102. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Matahora;
103. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mathilda Batlayeri;
104. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Melak;
105. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Melonguane;
106. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Merdey;
107. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptana;
108. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Morowali;
109. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Muara Bungo;
110. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Muko-Muko;
111. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mulia;
112. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Naha;
113. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Namniwel;
114. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Namrole;
115. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor;
116. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Nunukan;
117. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oesman Sadik;
118. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Okaba;
119. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oksibil;
120. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Pitu;
121. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Pogogul;
122. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Raja Haji Abdullah;
123. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rampi;
124. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ranai, Natuna;
125. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rembele;
126. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sangia Nibandera;
127. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Seko;
128. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Senggeh;
129. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Siboru;
130. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari;
131. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Soa;
132. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Stevanus Rumbewas;
133. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sugimanuru;
134. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Bantilan;
135. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;
136. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanah Merah;
137. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Api;
138. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan;
139. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu;
140. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan;
141. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teuku Cut Ali;
142. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tiom;
143. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Toraja;
144. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo;
145. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tumbang Samba;
146. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung;
147. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Utarom;
148. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Waghete;
149. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai;

150. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wasior;
151. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wunopito;
152. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring; dan
153. Pegawai yang disumpah.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : SM.108/181/SDJ.SDM/2026
Klasifikasi : Biasa
Hal : Pembukaan Program Beasiswa
Australia Awards Intake 2027

Jakarta, 26 Maret 2026

- Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala Kantor UPBU.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: SM.205/1/1/BPSDMP/2026 tanggal 9 Maret 2026 hal Pembukaan Program Beasiswa *Australia Awards Intake 2027*, dengan hormat disampaikan bahwa Pemerintah Australia menyediakan kesempatan untuk memperoleh beasiswa dalam mengikuti Pendidikan pasca sarjana (Master/PhD) di institusi Pendidikan di Australia melalui program beasiswa *Australia Awards Scholarships Intake 2027*.

Adapun persyaratan mengikuti seleksi beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Kementerian Perhubungan yang berminat mengikuti seleksi beasiswa dimaksud harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Bagi pegawai Negeri Sipil dalam Bentuk Pendidikan melalui Mekanisme Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan memenuhi standar kompetensi yang relevan dengan jabatan;
2. Memenuhi persyaratan, prosedur pendaftaran dan seleksi yang ditentukan oleh *Australia Awards*. Informasi, persyaratan dan pendaftaran program dimaksud dapat diakses melalui tautan <https://oz.link/AAS>. Pendaftaran program dimaksud dibuka sampai dengan tanggal 30 April 2026 pukul 11:00 WIB;
3. Pencalonan peserta agar melampirkan berkas administrasi sebagai berikut:
 - a. Salinan SK Pengangkatan PNS;
 - b. Transkrip IPK Pendidikan sebelumnya;
 - c. Sertifikat IELTS minimal skor 6.0/TOEFL ITP minimal skor 552/TOEFL iBT minimal skor 80/*PTE Academic* minimal skor 56) dan bukan merupakan sertifikat *prediction test* dengan masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun pada tanggal 1 Januari 2027;
 - d. Surat Permohonan Mengikuti Pendaftaran Beasiswa dan Perguruan Tinggi dari Kepala Kantor;
 - e. Surat Persetujuan untuk Mengikuti Proses Pendaftaran Perguruan Tinggi dan/atau Beasiswa dari Kepala Kantor;
 - f. Surat Pernyataan Tidak dalam Hukuman Disiplin;
 - g. Konsep *Nominating Agency Declaration* dalam format Microsoft Word yang telah diisi.

Seluruh...

Seluruh dokumen diunggah ke dalam tautan https://bit.ly/DaftarAAS_Intake2027. Informasi mengenai pengunggahan dokumen program dimaksud dapat menghubungi Sdri. Keke (087838759305). Batas akhir pengunggahan dokumen ke dalam tautan adalah 10 April 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : PT.105/330/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 12 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Balai;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Para Kepala Kantor UPBU.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor PT.105/2/II/PPTB tanggal 9 April 2026 perihal Permintaan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan bahwa setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026. Laporan disampaikan dalam bentuk softcopy melalui tautan: <https://bit.ly/LaporanSKMTahun2026> paling lambat tanggal 10 pada setiap triwulan.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Sdri. Nina Lestari (0852 2839 0650) dan Sdr. Aldafi (0851 5636 1183).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : SM.205/100/DJPU.SDM/2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penawaran ITAarea-ICAO Developing
Countries Scholarship Programme 2026

Jakarta, 1 Mei 2026

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala Kantor UPBU
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti State Letter Nomor: TC 2/3.56 ESP/25/002-26/31 tanggal 27 April 2026 perihal ITAarea-ICAO Developing Countries Scholarship Programme 2026, dengan hormat disampaikan penawaran ITAarea-ICAO Developing Countries Scholarship Programme 2026 untuk beberapa jenis program Master dan Diploma (penawaran terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi pegawai yang berminat memanfaatkan tawaran dimaksud dapat segera mengusulkan diri dengan mengisi formulir terlampir dan disampaikan ke Bagian Sumber Daya Manusia guna proses seleksi dan penandatanganan *Endorsment* oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk nanti selanjutnya berlanjut ke pendaftaran secara online melalui situs <http://www.itaarea.com/icaoscholarships>. Batas akhir pengusulan diharapkan 1 minggu sebelum batas deadline pendaftaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.207/420/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 8 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Modul Microsite UPBU

Yth. 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan informasi dan publikasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan tindak lanjut pengembangan microsite sebagai media publikasi resmi unit kerja yang terintegrasi melalui *Indonesia Civil Aviation Portal* (ICAP), serta dalam rangka persiapan penilaian AKIP, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Microsite Unit Penyelenggara Bandar Udara, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 11 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting
Meeting ID : 879 6089 4596
Passcode : microsite

Pimpinan Rapat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau yang mewakili

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya unit kerja dapat menugaskan pegawai/admin yang menangani pengelolaan website atau publikasi informasi (kehumasan) untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.106/475/SDJ.HMU/2026 Jakarta, 26 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Perhubungan
Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan
Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara

Yth. 1. Para Kepala Balai;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Umum Nomor : UM.106/1/2/STJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 Hal Penyampaian Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, kerapian dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Nomor SE-SKJ 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Kementerian Perhubungan **dinyatakan tidak berlaku**;
2. Telah diterbitkan Surat Edaran atas nama Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pengganti atas surat edaran sebagaimana tersebut pada angka 1;
3. Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI mengacu pada surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
4. Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas administratif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran sebagaimana tersebut pada angka 2, sedangkan bagi pegawai ASN yang bertugas di operasional/lapangan agar mengenakan pakaian dinas operasional/lapangan pada masing-masing unit organisasi serta tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Pimpinan Unit Kerja agar menyampaikan ketentuan tersebut kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan pakaian dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana ketentuan yang disampaikan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Plt. Kepala Bagian Humas dan Umum



Endah Purnama Sari
NIP. 19680704 199503 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : PT.105/499/SDJ.OTL/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Partisipasi Pengisian Kuesioner SKM Layanan
Internal Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Bulan Juni 2026

Jakarta, 3 Juni 2026

Yth. (Periksa Alamat Terlampir)

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM, disampaikan bahwa seluruh instansi pemerintah diharapkan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bersama ini disampaikan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan internal yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang meliputi:

1. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Sumber Daya Manusia;
2. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Keuangan;
4. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum; dan
6. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar berpartisipasi dalam pelaksanaan survei dimaksud dengan mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui tautan <https://skm.dephub.go.id/ly/cZnTzb0M> paling lambat tanggal 30 Juni 2026 dengan jumlah responden minimal 6 (enam) orang untuk setiap unit organisasi.

Hasil survei ini akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pelaksanaan dan hasilnya akan dipantau oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara

Nomor : PT.105/499/SDJ.OTL/2026

Tanggal : 3 Juni 2026

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin;
2. Kepala Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai;
3. Kepala Kantor UPBU Kelas II Rendani;
4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh;
5. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasikin;
6. Kepala Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali;
7. Kepala Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh;
8. Kepala Kantor UPBU Kelas III Rembele;
9. Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang;
10. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai;
11. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo;
12. Kepala Kantor UPBU Kelas III Letung;
13. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ranai;
14. Kepala Kantor UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah;
15. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai;
16. Kepala Kantor UPBU Kelas III Japura;
17. Kepala Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo;
18. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumban Tobing;
19. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasondre;
20. Kepala Kantor UPBU Kelas III Muara Bungo;
21. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mukomuko;
22. Kepala Kantor UPBU Kelas III Silampari;
23. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung;
24. Kepala Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana;
25. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dewadaru;
26. Kepala Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo;
27. Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir;
28. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;
29. Kepala Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega;
30. Kepala Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/535/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 15 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penguatan Integritas, Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Yth.

1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal, Nomor: KP.904/3/4/ITJEN/2026 tanggal 8 Juni 2026, Perihal Penguatan Integritas, Pencegahan dan Pemberantasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memperkuat nilai-nilai jajaran integritas dan antikorupsi, diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan adanya perhatian dan dukungan dari pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menegaskan kembali komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Senantiasa menjadi teladan (*role model*) dalam penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan unit kerja dan tidak terbatas pada:
 - a. Penguatan pengendalian intern;
 - b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis;
 - c. Penerapan manajemen risiko, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko fraud;
 - d. Pengelolaan konflik kepentingan;
 - e. Pengendalian gratifikasi;
 - f. Pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif;
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas.
3. Melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi secara tegas sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penyimpangan, atau praktik koruptif, serta segera berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan internalisasi dan penguatan budaya integritas secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing melalui **pengarahan apel setiap hari Senin**, serta melalui berbagai media dan forum komunikasi, antara lain apel kedinasan lainnya, rapat manajemen, sosialisasi, pembinaan pegawai, maupun kegiatan lainnya yang relevan. Pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada seluruh pegawai, di antaranya:

- a. Senantiasa menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - b. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menghindari dan melaporkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
5. Memastikan bahwa penguatan integritas dan pencegahan korupsi menjadi bagian yang melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pegawai.

Upaya penguatan integritas, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan pegawai sehingga diharapkan peran aktif seluruh pimpinan untuk terus membangun lingkungan kerja yang bersih, profesional dan bebas dari praktik korupsi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : TI.201/576/SDJ.OTL/2026
Klasifikasi : **Segera**
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permintaan Data Dukung Penilaian Kinerja
Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Tahun 2026

Jakarta, 29 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir.

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu melengkapi data dukung sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu agar dapat menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung apabila tersedia, sesuai dengan indikator berikut:

1. Pengisian daftar perangkat survei atau pengumpulan data geospasial dan unggah bukti kegiatan penggunaannya (peralatan pengukuran dan laporan pekerjaan atau dokumen pendukung lainnya) melalui tautan: <https://lnk.dephub.go.id/peralatangeospasial>;
2. Pengisian daftar perangkat lunak pengolah data geospasial melalui tautan: <https://lnk.dephub.go.id/perangkatlunak>;
3. Sertifikat Kompetensi SDM Kebumihan bagi pegawai yang memiliki kompetensi di bidang geospasial agar diunggah melalui tautan: https://lnk.dephub.go.id/Sertifikat_Kompetensi_SDM_Kebumihan.

Untuk mendukung kelancaran proses penilaian, kami mohon agar data dan dokumen dimaksud dapat disampaikan **paling lambat tanggal 03 Juli 2026**. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Muhamad Rizky Kurniawan pada nomor 0813-8310-2950.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara

Nomor : TI.201/576/SDJ.OTL/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

Kepada Yth.:

1. Direktur Bandar Udara;
2. Direktur Navigasi Penerbangan;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
4. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
6. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : PT.105/650/SDJ.OTL/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan dan Penyampaian Laporan Forum
Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026
Jakarta, 15 Juli 2026

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Balai;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; dan
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor PT.105/3/25/PPTB/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Sosialisasi Forum Konsultasi Publik dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), bersama ini disampaikan agar setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat diselenggarakan secara luring, daring, maupun *hybrid*.
2. Menentukan tema Forum Konsultasi Publik berdasarkan kebutuhan dan isu pelayanan publik pada unit kerja masing-masing, antara lain hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan, hasil evaluasi pelayanan publik, penyusunan kebijakan pelayanan publik, pelayanan bagi kelompok rentan, atau tema lain yang relevan.
3. Menyusun Berita Acara, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Tindak Lanjut sesuai format yang telah ditetapkan. Template dokumen dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/templatefcp>.
4. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat tanggal 20 Oktober 2026.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan dan penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dapat menghubungi narahubung Sdri. Nina Lestari (085228390650) atau Sdri. Aldafi (085156361183)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013

Fax : 3505135 – 3505139
3507144

Nomor : SM.301/364/SDJ.SDM/2026
Kualifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2026
di lingkungan PPSDMAP

Jakarta, 16 Juli 2026

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Nomor SM.301/1/9/PPSDMAP/2026 perihal Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2026, bersama ini kami meneruskan informasi kepada seluruh Alumni Pelatihan PPSDMAP Tahun Anggaran 2025 beserta Atasan Langsung masing-masing Unit Kerja.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan terhadap peningkatan kinerja alumni, serta sebagai dasar perbaikan mutu program pendidikan dan pelatihan ke depannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat melakukan pengisian kuesioner yang dilaksanakan pada:

- Hari / Tanggal: Rabu s.d. Sabtu, 8 s.d. 18 Juli 2026
- Media / Platform: Evaluasi Pasca Pelatihan - Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

Tata cara pengisian survei telah kami sertakan pada dokumen lampiran surat ini. Jika Bapak/Ibu mengalami kendala teknis dalam pengisian LMS, silakan menghubungi narahubung: Sdr. Rizal (089516690780).

Mengingat pentingnya evaluasi ini bagi Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, mohon kerja samanya untuk dapat menyelesaikan pengisian kuesioner sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Plh. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia



Gyma Ramadhani
NIP.: 198306132008122001

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Yth. :

1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
3. Direktur Bandar Udara;
4. Direktur Keamanan Penerbangan;
5. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
6. Direktur Navigasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
8. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum;
10. Kepala Bagian Hukum Dan Kerja Sama;
11. Kepala Bagian Keuangan;
12. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
13. Kepala Bagian Perencanaan;
14. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
15. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta;
16. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
17. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
18. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
19. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
20. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
21. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
22. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
23. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
24. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
25. Kepala Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
26. Kepala Kantor UPBU Kelas I Djalaluddin;
27. Kepala Kantor UPBU Budiarto;
28. Kepala Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard Osok Sorong;
29. Kepala Kantor UPBU Kelas I Haluoleo;
30. Kepala Kantor UPBU Kelas I Kalimantan;
31. Kepala Kantor UPBU Kelas I Mopah;
32. Kepala Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata;
33. Kepala Kantor UPBU Kelas I Wamena;
34. Kepala Kantor UPBU Kelas II Binaka;
35. Kepala Kantor UPBU Kelas II Cut Nyak Dhien Nagan Raya;
36. Kepala Kantor UPBU Kelas II Douw Aturure;
37. Kepala Kantor UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda;
38. Kepala Kantor UPBU Kelas II Gusti Sjamsir Alam;
39. Kepala Kantor UPBU Kelas II H. Asan;
40. Kepala Kantor UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman;
41. Kepala Kantor UPBU Kelas II Iskandar;
42. Kepala Kantor UPBU Kelas II Karel Sadsuitubun;
43. Kepala Kantor UPBU Kelas II Kasiguncu;
44. Kepala Kantor UPBU Kelas II Komodo;
45. Kepala Kantor UPBU Kelas II Lede Kalumbang;
46. Kepala Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin;
47. Kepala Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai;
48. Kepala Kantor UPBU Kelas II Pangsuma;
49. Kepala Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman;
50. Kepala Kantor UPBU Kelas II Rendani;
51. Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin;
52. Kepala Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir;
53. Kepala Kantor UPBU Kelas II Tumpa Padang;
54. Kepala Kantor UPBU Kelas II Tebelian;
55. Kepala Kantor UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda;
56. Kepala Kantor UPBU Kelas III A. A. Bere Tallo;
57. Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang;
58. Kepala Kantor UPBU Kelas III Akimuga;
59. Kepala Kantor UPBU Kelas III Amahai;
60. Kepala Kantor UPBU Kelas III Andi Jemma;
61. Kepala Kantor UPBU Kelas III Arung Palakka;
62. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ayawasi;
63. Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo;
64. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bade;

- 65. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bandaneira;
- 66. Kepala Kantor UPBU Kelas III Batom;
- 67. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari;
- 68. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bilorai;
- 69. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bintuni;
- 70. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bokondini;
- 71. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bomakia;
- 72. Kepala Kantor UPBU Kelas III Buli;
- 73. Kepala Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana;
- 74. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo;
- 75. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabra;
- 76. Kepala Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai;
- 77. Kepala Kantor UPBU Kelas III David Constantijn Saudale;
- 78. Kepala Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo;
- 79. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dewadaru;
- 80. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo;
- 81. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumbantobing;
- 82. Kepala Kantor UPBU Kelas III Elelim;
- 83. Kepala Kantor UPBU Kelas III Emalamo;
- 84. Kepala Kantor UPBU Kelas III Enarotali;
- 85. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer;
- 86. Kepala Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega;
- 87. Kepala Kantor UPBU Kelas III Gamar Malamo;
- 88. Kepala Kantor UPBU Kelas III Gewayantana;
- 89. Kepala Kantor UPBU Kelas III H. Aroeppala;
- 90. Kepala Kantor UPBU Kelas III Haji Muhammad Sidik;
- 91. Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir;
- 92. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga;
- 93. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilu;
- 94. Kepala Kantor UPBU Kelas III Inanwatan;
- 95. Kepala Kantor UPBU Kelas III Japura;
- 96. Kepala Kantor UPBU Kelas III John Becker;
- 97. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kambuaya;
- 98. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kamur;
- 99. Kepala Kantor UPBU Kelas III Karubaga;
- 100. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kebar;
- 101. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi;
- 102. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kimaam;
- 103. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kokonao;
- 104. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kol. Robert Atty Bessing;
- 105. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kuabang;
- 106. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kuala Kurun;
- 107. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kuala Pembuang;
- 108. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lagaligo;
- 109. Kepala Kantor UPBU Kelas III Larat;
- 110. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasikin;
- 111. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasondre;
- 112. Kepala Kantor UPBU Kelas III Letung;
- 113. Kepala Kantor UPBU Kelas III Long Apung;
- 114. Kepala Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh;
- 115. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mali;
- 116. Kepala Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh;
- 117. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mararena;
- 118. Kepala Kantor UPBU Kelas III Marinda;
- 119. Kepala Kantor UPBU Kelas III Matahora;
- 120. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mathilda Batlayeri;
- 121. Kepala Kantor UPBU Kelas III Melalan;
- 122. Kepala Kantor UPBU Kelas III Melonguane;
- 123. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai;
- 124. Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey;
- 125. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah;
- 126. Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani;
- 127. Kepala Kantor UPBU Kelas III Morowali;
- 128. Kepala Kantor UPBU Kelas III Muara Bungo;
- 129. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mukomuko;
- 130. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mulia;
- 131. Kepala Kantor UPBU Kelas III Naha;
- 132. Kepala Kantor UPBU Kelas III Namniwel;
- 133. Kepala Kantor UPBU Kelas III Namrole;

- 134. Kepala Kantor UPBU Kelas III Nangapinoh;
- 135. Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor;
- 136. Kepala Kantor UPBU Kelas III Nunukan;
- 137. Kepala Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik;
- 138. Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba;
- 139. Kepala Kantor UPBU Kelas III Oksibil;
- 140. Kepala Kantor UPBU Kelas III Pitu;
- 141. Kepala Kantor UPBU Kelas III Pogogul;
- 142. Kepala Kantor UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah;
- 143. Kepala Kantor UPBU Kelas III Rampi;
- 144. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ranai;
- 145. Kepala Kantor UPBU Kelas III Rembele;
- 146. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sanggu;
- 147. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera;
- 148. Kepala Kantor UPBU Kelas III Seko;
- 149. Kepala Kantor UPBU Kelas III Senggeh;
- 150. Kepala Kantor UPBU Kelas III Siboru;
- 151. Kepala Kantor UPBU Kelas III Silampari;
- 152. Kepala Kantor UPBU Kelas III Soa;
- 153. Kepala Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas;
- 154. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru;
- 155. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sultan Bantilan;
- 156. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;
- 157. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah;
- 158. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Api;
- 159. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan;
- 160. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tardamu;
- 161. Kepala Kantor UPBU Kelas III Teminabuan;
- 162. Kepala Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali;
- 163. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tiom;
- 164. Kepala Kantor UPBU Kelas III Toraja;
- 165. Kepala Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo;
- 166. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai;
- 167. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba;
- 168. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung;
- 169. Kepala Kantor UPBU Kelas III Utarom;
- 170. Kepala Kantor UPBU Kelas III Waghete;
- 171. Kepala Kantor UPBU Kelas III Wahai;
- 172. Kepala Kantor UPBU Kelas III Wasior;
- 173. Kepala Kantor UPBU Kelas III Wunopito;
- 174. Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semaring;
- 175. Kepala Kantor UPBU Khusus Ibu Kota Nusantara.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Plh. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia



Gyma Ramadhani
NIP.: 198306132008122001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/214/DJPU/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

Jakarta, 22 Juli 2026

- Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Para Kepala Balai;
5. Para Kepala Bagian.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE-PHB 4 Tahun 2024 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta sebagai upaya mendukung percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026, seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara **Wajib** menggunakan Aplikasi SRIKANDI secara penuh dalam penyelenggaraan tata naskah dinas, baik untuk korespondensi internal maupun eksternal.
2. Aplikasi SRIKANDI dapat diakses melalui tautan <https://srikandi.arsip.go.id/> menggunakan akun yang telah diberikan oleh Administrator SRIKANDI pada Unit Kearsipan.
3. Pimpinan unit kerja agar memastikan seluruh pegawai, pengelola tata usaha, pengelola persuratan, pengelola kearsipan dan administrator SRIKANDI di unit kerjanya telah menggunakan aplikasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit kerja secara berkala, serta menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

5. Penggunaan naskah dinas secara konvensional hanya diperkenankan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Terjadi gangguan pada sistem elektronik yang telah diumumkan secara resmi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. Naskah dinas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan
 - c. Kondisi tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan penandatanganan secara konvensional, antara lain Perjanjian kerja Sama dan naskah dinas yang bersifat rahasia.
6. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI secara penuh diharapkan dapat menjamin kelancaran penyampaian naskah dinas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta menghindari keterlambatan maupun tidak tersampainya surat dinas akibat penggunaan mekanisme korespondensi di luar aplikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Achmad Setiyo Prabowo
197408191995011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telepon : 350550 – 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3 5 05139
3507144 - 34833369

Nomor : UM.006/47/17/DR-SU.REN - 2026 Jakarta, 5 Agustus 2026
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Penginputan dan Pemutakhiran Data Aplikasi
Emonev Bappenas (PP 39) dan e-Mon 2022

Yth. Periksa Alamat Terlampir

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Melalui Sistem E-Monitoring dan Reporting di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam rangka mendukung ketersediaan data pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap, mutakhir, dan tepat waktu di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, agar kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Melaksanakan:

1. Penginputan dan pemutakhiran data (realisasi keuangan dan fisik) pada Aplikasi Emonev Bappenas (PP 39) dan e-Mon 2022 secara rutin, berkala dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
2. Memastikan data yang diinput sesuai dengan kondisi dan realisasi pelaksanaan kegiatan serta dokumen pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
3. Menunjuk personil yang berkompeten sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap penginputan dan pemutakhiran data laporan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



Lukman F. Laiza

NIP. 19680306 199303 1 001

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.C06/47/17/PERJU.PEN-2026
Tanggal : 5 Agustus 2026

Yth. :

1. Direktur Bandar Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Direktur Navigasi Penerbangan;
4. Direktur Keamanan Penerbangan;
5. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
6. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
7. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
8. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
9. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
10. Para Kepala Kantor UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.



Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lukman F. Laiza

NIP. 19680306 199303 1 001

Tembusan:

Sekretaris Jenderal kementerian Perhubungan

Beranda

Dashboard

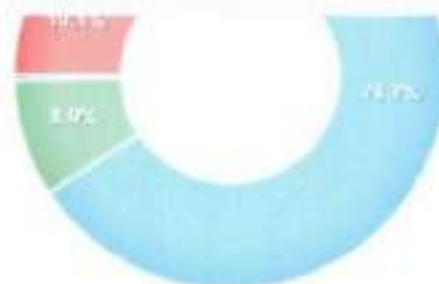
Unit Kerja Eselon I

Pengendalian

Pelaksanaan 3

Pemantauan 3

Generate 3



Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Selesai Belum Laporan

Kelengkapan

Keseluruhan

RD Renda

Komponen

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des



100%



100%



100%



100%



100%



100%



65.4%



0%



0%



0%



0%



0%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
1	<u>180945KANTOR UPBU TANJUNG</u>	13,98 M	8,62 M	61.6	55.5%	0%
2	<u>288042KANTOR PUSAT DITJEN</u>	295,53 M	177,22 M	60	48.48%	0%
3	<u>288216KANTOR UPBU DR.</u>	22,20 M	13,29 M	59.9	66.21%	0%
4	<u>288241KANTOR UPBU JAPURA</u>	8,37 M	5,85 M	69.9	50.83%	0%
5	<u>288262KANTOR UPBU DABO</u>	52,29 M	45,13 M	86.3	50.36%	0%
6	<u>288372KANTOR UPBU JUWATA</u>	153,64 M	104,80 M	68.2	46.05%	0%
7	<u>288393KANTOR UPBU</u>	117,13 M	89,85 M	76.7	28.46%	0%
8	<u>288401KANTOR UPBU MUTIARA</u>	58,00 M	26,17 M	45.1	26.15%	0%
9	<u>288436KANTOR UPBU HALUOLEO</u>	72,68 M	32,69 M	45	62.79%	0%
#	<u>288457KANTOR UPBU SULTAN</u>	83,02 M	38,49 M	46.4	29.62%	0%
#	<u>288482KANTOR UPBU SULTAN</u>	16,90 M	10,47 M	61.9	50.3%	0%
#	<u>288499KANTOR UPBU SULTAN</u>	24,97 M	17,83 M	71.4	36.62%	100%
#	<u>288511KANTOR UPBU UMBU</u>	37,99 M	28,83 M	75.9	49.9%	0%
#	<u>288525KANTOR UPBU LEDE</u>	21,13 M	15,49 M	73.3	52.56%	0%
#	<u>288532KANTOR UPBU</u>	23,90 M	17,61 M	73.7	57.31%	0%
#	<u>288571KANTOR UPBU RENDANI</u>	68,73 M	42,53 M	61.9	42.58%	0%
#	<u>288588KANTOR UPBU DOMINE</u>	99,64 M	61,49 M	61.7	32.77%	0%
#	<u>288592KANTOR UPBU MOPAH</u>	111,48 M	91,74 M	82.3	27.56%	0%
#	<u>288600KANTOR UPBU WAMENA</u>	103,45 M	56,69 M	54.8	40.65%	0%
#	<u>288614KANTOR UPBU DOUW</u>	59,45 M	51,93 M	87.3	46.1%	0%
#	<u>288745KANTOR</u>	88,74 M	58,80 M	66.4	52.17%	100%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	UPBU AJI	66,74 M	58,93 M	88.4	52.17%	100%
#	320344KANTOR UPBU RANAI	16,99 M	11,35 M	66.8	67.69%	0%
#	413828KANTOR UPBU BUDIARTO	30,29 M	23,53 M	77.7	45.05%	0%
#	413834KANTOR UPBU FRANS	14,92 M	8,13 M	54.5	57.47%	0%
#	413840KANTOR UPBU GUSTI	17,02 M	12,23 M	71.9	44.4%	20%
#	413859KANTOR UPBU	36,78 M	30,79 M	83.7	59.6%	100%
#	413865KANTOR UPBU CUT NYAK	10,19 M	8,44 M	82.8	58.94%	0%
#	413871KANTOR UPBU SIBORU	49,00 M	45,47 M	92.8	57.33%	100
#	413880KANTOR UPBU ISKANDAR	38,87 M	30,39 M	78.2	38.5%	100
#	413900KANTOR UPBU TUNGGUL	13,60 M	10,52 M	77.4	54.21%	0%
#	413916KANTOR UPBU BINAKA	46,18 M	40,38 M	87.4	51.92%	56.3%
#	413922KANTOR UPBU RAHADI	20,83 M	17,78 M	85.4	54.19%	0%
#	413931KANTOR UPBU TEBELIAN	40,74 M	25,33 M	62.2	50.31%	0%
#	413947KANTOR UPBU H. ASAN	22,07 M	14,21 M	64.4	48.82%	0%
#	413953KANTOR UPBU HAJI	15,20 M	5,76 M	37.9	33.21%	0%
#	413962KANTOR UPBU	70,05 M	41,43 M	59.1	33.71%	0%
#	413978KANTOR UPBU NAHA	35,09 M	30,49 M	86.9	58.73%	0%
#	413984KANTOR UPBU SYUKURAN	25,08 M	16,47 M	65.7	37.46%	0%
#	413990KANTOR UPBU SULTAN	11,23 M	9,05 M	80.6	80.1%	100
#	414004KANTOR UPBU BETO	57,16 M	30,64 M	53.6	53.33%	0%
#	414010KANTOR UPBU	9,29 M	5,54 M	59.6	32.85%	0%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	<u>414029KANTOR UPBU H HASAN</u>	23,31 M	13,71 M	58.8	43.45%	0%
#	<u>414035KANTOR UPBU STEVANUS</u>	23,14 M	20,59 M	89	60.6%	0%
#	<u>414041KANTOR UPBU BINTUNI</u>	5,80 M	5,26 M	90.8	53.59%	0%
#	<u>414050KANTOR UPBU TANAH</u>	46,82 M	40,41 M	86.3	51.41%	100
#	<u>414066KANTOR UPBU MARARENA</u>	4,95 M	3,94 M	79.6	54.52%	0%
#	<u>414072KANTOR UPBU</u>	25,38 M	4,00 M	15.7	58.45%	0%
#	<u>414081KANTOR UPBU OKSIBIL</u>	120,36 M	70,66 M	58.7	41.1%	0%
#	<u>414097KANTOR UPBU ENAROTALI</u>	5,86 M	5,06 M	86.2	79.06%	100
#	<u>414101KANTOR UPBU WAGHETE</u>	7,03 M	5,02 M	71.5	63.38%	0%
#	<u>414117KANTOR UPBU MULIA</u>	8,32 M	5,39 M	64.8	41.48%	0%
#	<u>414123KANTOR UPBU UTAROM</u>	13,71 M	10,87 M	79.2	65.75%	100
#	<u>414132KANTOR UPBU TEUKU</u>	29,55 M	7,68 M	26	61.17%	100
#	<u>414148KANTOR UPBU LASIKIN</u>	29,71 M	25,29 M	85.1	43.7%	0%
#	<u>414154KANTOR UPBU MENTAWAI</u>	8,98 M	5,90 M	65.6	48.78%	0%
#	<u>414160KANTOR UPBU RAJA HAJI</u>	16,90 M	12,49 M	73.9	59.36%	0%
#	<u>414179KANTOR UPBU DEPATI</u>	25,72 M	22,32 M	86.8	64.11%	0%
#	<u>414185KANTOR UPBU</u>	18,87 M	15,86 M	84	48.18%	0%
#	<u>414191KANTOR UPBU TAMPA</u>	30,09 M	19,95 M	66.3	52.5%	0%
#	<u>414205KANTOR UPBU TORAJA</u>	20,32 M	9,23 M	45.4	27.75%	0%
#	<u>414211KANTOR UPBU OESMAN</u>	13,54 M	12,14 M	89.7	77.2%	100
#	<u>414220KANTOR</u>	7,28 M	5,60 M	76.1	55.56%	0%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	<u>UPBU GAMAR</u>	1,20 M	0,00 M	0.0	00.00%	0%
#	<u>414236KANTOR UPBU MALI</u>	16,59 M	24,78 M	149.4	47.15%	0%
#	<u>414242KANTOR UPBU</u>	15,70 M	10,46 M	66.6	52.61%	0%
#	<u>414251KANTOR UPBU KOMODO</u>	51,31 M	39,18 M	76.4	34.16%	0%
#	<u>417706KANTOR UPBU KOL</u>	16,57 M	13,17 M	79.4	53.17%	7.1%
#	<u>417708KANTOR UPBU TANJUNG</u>	13,62 M	8,32 M	61.1	46.43%	0%
#	<u>417720KANTOR UPBU LONG</u>	9,39 M	5,96 M	63.4	69.38%	100
#	<u>419220KANTOR UPBU SEKO</u>	9,01 M	7,17 M	79.6	41.67%	40%
#	<u>419221KANTOR UPBU RAMPI</u>	9,82 M	8,70 M	88.6	70%	100
#	<u>447786KANTOR UPBU TIOM</u>	29,87 M	4,85 M	16.2	61.45%	0%
#	<u>447899KANTOR UPBU BULI</u>	9,09 M	6,04 M	66.4	64.98%	0%
#	<u>449005KANTOR UPBU ELELIM</u>	47,21 M	43,04 M	91.2	40.2%	100
#	<u>449461KANTOR UPBU ARUNG</u>	16,11 M	7,64 M	47.4	63.11%	0%
#	<u>449462KANTOR UPBU LAGALIGO</u>	15,79 M	11,81 M	74.8	57.11%	7.7%
#	<u>449464KANTOR UPBU MATAHORA</u>	11,78 M	8,97 M	76.1	66.89%	0%
#	<u>449465KANTOR UPBU SANGIA NI</u>	14,34 M	8,39 M	58.5	36.75%	0%
#	<u>449466KANTOR UPBU AMAHAI</u>	7,44 M	3,50 M	47	44.29%	0%
#	<u>449467KANTOR UPBU WAHAI</u>	5,44 M	3,83 M	70.5	52.42%	0%
#	<u>449468KANTOR UPBU NAMROLE</u>	10,51 M	4,67 M	44.4	49.5%	0%
#	<u>449469KANTOR UPBU JOHN</u>	10,77 M	9,01 M	83.7	65.8%	0%
#	<u>449470KANTOR UPBU LARAT</u>	5,21 M	3,33 M	64	34.91%	0%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	449482KANTOR UPBU KIWIROK	4,33 M	3,74 M	86.5	46,11%	100
#	449484KANTOR UPBU AKIMUGA	4,05 M	2,54 M	62.7	60%	0%
#	449487KANTOR UPBU MARINDA	6,81 M	4,62 M	67.9	45%	0%
#	449488KANTOR UPBU SILAMPARI	56,97 M	41,57 M	73	66.17%	0%
#	449491KANTOR UPBU EMALAMO	22,07 M	5,92 M	26.8	60.28%	36.4%
#	449493KANTOR UPBU PITU	11,73 M	10,12 M	86.2	60.73%	100
#	449508KANTOR UPBU H.	13,53 M	8,58 M	63.4	51.7%	0%
#	449514KANTOR UPBU DOBO	11,40 M	6,12 M	53.7	36.2%	0%
#	465487KANTOR UPBU REMBELE	37,02 M	16,16 M	43.7	48.29%	0%
#	465493KANTOR UPBU LASONDRE	16,46 M	4,92 M	29.9	75.73%	0%
#	465590DIREKTOR AT BANDAR	226,42 M	71,02 M	31.4	69.37%	0%
#	465601DIREKTOR AT ANGKUTAN	21,46 M	9,45 M	44	45.7%	0%
#	465610DIREKTOR AT KEAMANAN	25,55 M	7,12 M	27.9	31.51%	0%
#	465626DIREKTOR AT NAVIGASI	56,46 M	25,40 M	45	28.94%	0%
#	465632DIREKTOR AT	70,12 M	34,40 M	49.1	57.84%	0%
#	465641KANTOR OTORITAS	36,70 M	23,61 M	64.3	33.94%	0%
#	465657KANTOR OTORITAS	39,07 M	27,12 M	69.4	54.74%	0%
#	465663KANTOR OTORITAS	35,05 M	22,05 M	62.9	30.65%	0%
#	465672KANTOR OTORITAS	42,34 M	30,15 M	71.2	52.58%	52%
#	465675KANTOR OTORITAS	24,90 M	19,61 M	78.8	36.2%	0%
#	465676KANTOR	18,70 M	16,33 M	87.3	87.73%	100

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	OTORITAS	10,10 M	10,00 M	99.0	99.15%	100
#	465677KANTOR OTORITAS	21,17 M	16,46 M	77.8	63.03%	100
#	465678KANTOR OTORITAS	27,25 M	19,80 M	72.6	65.49%	0%
#	465679KANTOR OTORITAS	23,38 M	15,84 M	67.8	51.33%	0%
#	466250KANTOR UPBU POGOGUL	11,08 M	8,60 M	77.6	52.7%	100
#	466266KANTOR UPBU MATHILDA	14,96 M	7,37 M	49.2	40.55%	0%
#	466272KANTOR UPBU MOZES	153,88 M	96,50 M	62.7	39.02%	0%
#	499295KANTOR UPBU NAMNIWEL	6,91 M	4,51 M	65.2	39.19%	0%
#	499522KANTOR UPBU TUANKU	8,79 M	5,52 M	62.8	48.56%	0%
#	499531KANTOR UPBU	25,96 M	21,60 M	83.2	48.34%	0%
#	499562KANTOR UPBU MELAK	12,22 M	6,35 M	51.9	43.96%	0%
#	499578KANTOR UPBU KIMAM	6,43 M	5,04 M	73.4	59.93%	0%
#	499590KANTOR UPBU KAMUR	18,19 M	16,58 M	91.1	59.91%	100
#	499604KANTOR UPBU BOMAKIA	8,00 M	5,22 M	65.3	62.37%	0%
#	499635KANTOR UPBU DABRA	12,47 M	11,55 M	92.6	63.3%	0%
#	499641KANTOR UPBU TUMBANG	7,29 M	6,51 M	89.4	89%	100
#	512769KANTOR UPBU MUKO-	11,90 M	10,15 M	85.3	66.98%	100
#	512802KANTOR OTORITAS	48,34 M	31,80 M	65.8	34.08%	0%
#	517658KANTOR UPBU	5,21 M	3,32 M	63.7	56.51%	0%
#	517662KANTOR UPBU BOKONDINI	4,67 M	4,08 M	87.3	41.79%	0%
#	518138KANTOR UPBU KEPI	10,09 M	6,83 M	67.6	59.98%	0%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	<u>518142KANTOR UPBU OKABA</u>	7,65 M	6,14 M	80.3	57.93%	0%
#	<u>518159KANTOR UPBU</u>	4,83 M	4,62 M	95.5	74.73%	0%
#	<u>518163KANTOR UPBU WASIOR</u>	6,63 M	3,68 M	55.4	34%	0%
#	<u>518170KANTOR UPBU</u>	5,54 M	4,98 M	89.9	71.98%	100
#	<u>518184KANTOR UPBU</u>	5,81 M	4,92 M	84.7	52.45%	0%
#	<u>518191KANTOR UPBU MERDEY</u>	4,94 M	3,77 M	76.2	73%	0%
#	<u>518206KANTOR UPBU KOKONAO</u>	4,11 M	2,72 M	66.1	51.29%	0%
#	<u>521992KANTOR UPBU KUABANG</u>	11,93 M	8,43 M	70.6	42.1%	0%
#	<u>522007KANTOR UPBU</u>	16,47 M	10,28 M	62.4	64.83%	100
#	<u>522011KANTOR UPBU A A BERE</u>	11,61 M	7,86 M	67.7	68.53%	0%
#	<u>522028KANTOR UPBU DAVID</u>	10,04 M	8,34 M	83.1	74.36%	0%
#	<u>522032KANTOR UPBU TARDAMU</u>	17,34 M	7,95 M	45.9	49.73%	0%
#	<u>538992KANTOR UPBU SANGGU</u>	6,68 M	4,56 M	68.3	59.43%	0%
#	<u>539011KANTOR UPBU ANDI</u>	26,25 M	23,01 M	87.7	56.53%	0%
#	<u>539028KANTOR UPBU KAREL</u>	57,88 M	49,48 M	85.5	39.08%	0%
#	<u>547924KANTOR UPBU AEK</u>	12,00 M	8,76 M	73	48%	0%
#	<u>559662BADAN LAYANAN UMUM</u>	56,66 M	31,85 M	56.2	46.59%	0%
#	<u>559679BALAI TEKNIK</u>	21,12 M	12,74 M	60.4	39.12%	0%
#	<u>559683BADAN LAYANAN UMUM</u>	249,80 M	73,61 M	29.5	44.4%	0%
#	<u>568601KANTOR UPBU</u>	16,93 M	10,16 M	60	43.25%	0%
#	<u>568615KANTOR</u>	12,02 M	11,73 M	97.6	87.91%	100

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	UPBU DEWA	12,32 M	11,18 M	90.8	57.51%	100
#	568622KANTOR UPBU WONOPITO	24,66 M	22,34 M	90.6	59.58%	100
#	568636KANTOR UPBU KUALA	21,15 M	20,07 M	94.9	57.89%	100
#	568640KANTOR UPBU KUALA	6,83 M	5,32 M	77.8	63.32%	0%
#	568657KANTOR UPBU YUVAI	33,57 M	9,30 M	27.7	38.27%	0%
#	568661KANTOR UPBU NUNUKAN	11,91 M	8,57 M	72	45.05%	0%
#	568678KANTOR UPBU NUMFOR	6,21 M	4,39 M	70.7	49.51%	11.1%
#	568681KANTOR UPBU MUARA	8,88 M	6,83 M	73.9	47.48%	0%
#	606339KANTOR UPBU KARUBAGA	6,27 M	3,60 M	57.4	32.57%	0%
#	606343KANTOR UPBU EWER	55,48 M	50,62 M	91.2	57.52%	100
#	606350KANTOR UPBU ILLU	5,26 M	3,66 M	69.7	36.7%	0%
#	606364KANTOR UPBU BABO	6,22 M	4,92 M	73.1	64.7%	0%
#	606371KANTOR UPBU KAMBUAYA	9,02 M	7,28 M	80.7	58.1%	0%
#	649045KANTOR UPBU MOROWALI	51,53 M	33,29 M	64.6	49%	0%
#	649046KANTOR UPBU LETUNG	14,80 M	11,36 M	73.8	58.53%	0%
#	649047KANTOR UPBU HARUN	6,58 M	6,58 M	99.9	87.4%	100
#	649048KANTOR UPBU MARATUA	8,09 M	5,67 M	70.1	35.66%	0%
#	649049KANTOR UPBU	17,04 M	15,03 M	88.2	41.67%	100
#	649821KANTOR UPBU BADE	9,41 M	4,92 M	52.3	51.29%	0%
#	649835KANTOR UPBU SENGGEH	6,78 M	6,31 M	93.1	55.91%	0%
#	649842KANTOR UPBU BATOM	5,51 M	4,34 M	78.8	52.46%	0%

#	Nomenklatur	Anggaran			Pelaksanaan	Jul
		Alokasi	Realisasi	%		
#	<u>649856KANTOR UPBU BILORAI</u>	6,21 M	4,37 M	70.4	52.72%	0%
#	<u>652591KANTOR UPBU ILAGA</u>	9,65 M	6,11 M	63.4	64.33%	0%
#	<u>652606KANTOR UPBU KEBAR</u>	8,17 M	7,24 M	83.7	68.58%	0%
#	<u>652610KANTOR UPBU AYAWASI</u>	5,03 M	3,67 M	72.9	48.54%	0%
#	<u>652627KANTOR UPBU MAIMUN</u>	8,16 M	6,08 M	74.5	43.27%	0%
#	<u>662815KANTOR UPBU SOA</u>	54,17 M	10,18 M	13.8	53.57%	0%
#	<u>662816KANTOR UPBU NOP</u>	71,17 M	57,76 M	81.2	46.38%	0%
#	<u>662855KANTOR UPBU DATAH</u>	7,93 M	4,38 M	55.3	50.56%	0%
#	<u>662862KANTOR UPBU</u>	12,43 M	9,30 M	74.8	65.9%	0%
#	<u>691275KANTOR UPBU</u>	21,11 M	14,63 M	69.3	59.36%	0%

MENU

Beranda

Dashboard

DPA

Input Data

Laporan

Realisasi Per Jenis Kegiatan

Backup Realisasi

Kontrol Roll

Pusat Karya

Realisasi

Per Program

Pembuatan

Visi Misi dan Tujuan

Tahun 2023 - 2024

TABEL ROWSHEET PC-PEN

Realisasi kegiatan berdasarkan data SPN-SAKT

Beranda > Laporan > Pusat Karya > TABEL ROWSHEET PC-PEN

Monev UPBU sebagai lembaga akan melaksanakan kegiatan dan tahun 2023. Aplikasi dapat diakses pada web: [Aplikasi ZKA](#)

Tahun Anggaran

2023

Unit Eselon I

DITJEN PERKESKORAN UTARA

Satuan Kerja

View

#	Kabkota	Nama KRO	Nama RO	Nama Akun	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan	Realisasi KCU	Target			Realisasi			
								Upah	Orang	Ort	Upah	Orang	Ort	Bahan Pendukung
[547924] KANTOR UPBU AEK GODANG														
1	[57] KAB PADANG LAMAS UTARA	Ort Pasarana Bidang Kendaraan Utara	Operasional dan Perawatan Pasarana Bidang Utara (PEN)	Belanja Perawatan Gelang dan Bangunan	Pagar	Rp. 22.000.000	Rp. 21.000.000	10	140	Rp. 10.000.000	10	140	Rp. 3.000.000	
2	[57] KAB PADANG LAMAS UTARA	Ort Pasarana Bidang Kendaraan Utara	Operasional dan Perawatan Pasarana Bidang Utara (PEN)	Belanja Perawatan Jalan dan Jembatan	Seni	Rp. 22.000.000	Rp. 21.000.000	10	140	Rp. 10.000.000	10	140	Rp. 3.000.000	
3	[57] KAB PADANG LAMAS UTARA	Ort Pasarana Bidang	Operasional dan Perawatan	Belanja Perawatan Kawat	Ornamen	Rp. 13.000.000	Rp. 12.000.000	6	94	Rp. 10.000.000	6	94	Rp. 2.000.000	

No	Nama ERO	Nama Alur	Sumber Dana	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan	Target			Realisasi			
						Upah	Orang	OK	Upah	Orang	OK	Bahan Pendukung
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip/Strainer 28051	IDR100.000.000,00	IDR 66.048.018,00	53	495	IDR 72.550.000,00	45	400	27650000
568601 KANTOR UPBU CANTABANGUNAN												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28054	IDR 15.000.000,00	IDR 9.750.000,00	5	75	IDR 4.000.000,00	5	40	10818000
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28055	IDR 12.000.000,00	IDR 7.800.000,00	4	90	IDR 11.000.000,00	3	120	
3	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28056	IDR130.000.000,00	IDR 97.500.000,00	50	750	IDR 78.080.500,00	53	663	30383000
568603 KANTOR UPBU CIWA DARU												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28057	IDR 34.000.000,00	IDR 17.520.000,00	8	120				
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28058	IDR 62.500.000,00	IDR 40.200.000,00	20	300				
3	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28160	IDR 40.845.000,00	IDR 30.640.000,00	14	210				
414134 KANTOR UPBU BOKOT												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar/Drainase Operasional 28059	IDR 22.200.000,00	IDR 16.907.789,00	8	128				
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28060	IDR 20.400.000,00	IDR 11.277.823,00	5	80				
3	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28061	IDR 14.400.000,00	IDR 8.510.427,00	6	73				
568622 KANTOR UPBU WOMOPITO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28063	IDR 37.000.000,00	IDR 175.000,00	45	320	IDR 175.000,00	35	245	14125000
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28064	IDR 65.000.000,00	IDR 175.000,00	50	350				
414152 KANTOR UPBU RAJA HAI ABU LAH												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28066	IDR 12.000.000,00	IDR 11.899.064,00	5	75	IDR 12.000.000,00	20	80	
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28068	IDR 84.054.000,00	IDR 48.796.215,00	24	364	IDR 48.000.000,00	60	320	35712000
3	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28069	IDR 20.000.000,00	IDR 18.153.725,00	9	135	IDR 18.000.000,00	20	120	
568634 KANTOR UPBU KUALA PEMBUANG												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28067	IDR157.000.000,00	IDR146.770.000,00	33	786	IDR145.500.000,00	30	800	15500000
404884 KANTOR UPBU ADINDUA												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28070	IDR 50.000.000,00	IDR 50.000.000,00	10	495				
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	STRIP 28071	IDR 50.000.000,00	IDR 50.000.000,00	13	495				
568640 KANTOR UPBU KUALA KURUN												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Fasilitas Sisi Udara 28072	IDR 57.000.000,00	IDR 57.000.000,00	19	304	IDR 44.500.000,00	15	227	12900000
454175 KANTOR UPBU DOPATI PARBO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28073	IDR116.300.000,00	IDR 94.500.000,00	43	634	IDR 23.500.000,00	10	150	4150000
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Saluran Air 28074	IDR 25.440.000,00	IDR 18.000.000,00	8	120	IDR 18.000.000,00	8	120	6975000
568657 KANTOR UPBU YUWA SIKAMANI												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase Sisi Darat 28075	IDR162.000.000,00	IDR107.600.000,00	70	795				
404856 KANTOR UPBU AMAHAI												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar Sisi Udara 28076	IDR 14.635.000,00	IDR 17.500.000,00	10	300	IDR 17.500.000,00	10	140	9800000
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar/gedung operasional 28077	IDR 38.400.000,00	IDR 37.000.000,00	10	840	IDR 38.000.000,00	25	100	2000000
568663 KANTOR UPBU NUNUKAN												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28078	IDR177.000.000,00	IDR116.901.451,00	58	875	IDR 45.000.000,00	20	300	14000000
414185 KANTOR UPBU PANGSUMA												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28080	IDR250.000.000,00	IDR112.092.035,00	66	990	IDR 135.300,00	66	990	
414211 KANTOR UPBU GUSMAN SADI												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28081	IDR177.618.000,00	IDR 18.750.000,00	21	525	IDR 58.800.000,00	42	420	28200000
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase sisi udara 28082	IDR 57.000.000,00	IDR 31.500.000,00	21	210	IDR 20.580.000,00	21	147	9420000
568678 KANTOR UPBU NUMTOR												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28083	IDR150.000.000,00	IDR 66.048.018,00	15	495	IDR 34.000.000,00	13	255	38000000
404220 KANTOR UPBU GAMAN MALIMO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28084	IDR 77.000.000,00	IDR 42.500.000,00	34	340				
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28085	IDR 56.000.000,00	IDR 37.500.000,00	10	300				
568683 KANTOR UPBU MUARA BUNDO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28087	IDR 38.847.000,00	IDR 38.200.000,00	16	494				
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Drainase 28088	IDR 39.000.000,00	IDR 26.400.000,00	16	192				
3	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Pagar 28089	IDR 9.000.000,00	IDR 3.437.500,00	5	25				
414236 KANTOR UPBU MALU												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar Sisi Udara 28091	IDR105.120.000,00	IDR 69.427.574,00	55	525	IDR 82.500.000,00	55	550	12000000
406343 KANTOR UPBU BAWO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28092	IDR100.000.000,00	IDR 66.048.018,00	13	297	IDR 47.320.000,00	33	297	53480000
414242 KANTOR UPBU GURAYANTAMA												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28094	IDR100.000.000,00	IDR 30.000.000,00	24	200	IDR 25.700.000,00	24	167	1844144
606390 KANTOR UPBU ILU												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	perbaikan saluran Drainase Sisi Udara 28095	IDR100.000.000,00	IDR 66.048.018,00	13	480				
414251 KANTOR UPBU KIMMOO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28097	IDR232.000.000,00	IDR162.400.000,00	36	3624				
606364 KANTOR UPBU BAGO												
1	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Pemeliharaan Pagar Sisi Udara 28098	IDR 62.800.000,00	IDR 46.048.018,00	20	400	IDR 48.384.335,00	33	429	13415865
2	DM Prasana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	PNBP	Drainase Sisi Udara 28101	IDR 37.200.000,00	IDR 20.000.000,00	13	304	IDR 28.846.154,00	25	150	8953846

No	Nama KSD	Nama Akun	Sumber Dana	Nama Kegiatan	Alokasi Kegiatan	Target			Realisasi			Rakun Penulいたung
						Uraih	Orang	OH	Uraih	Orang	OH	
417708	KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28109	IDR157.000.000.00	IDR201.091.248.00	52	780	IDR 30.800.000.00	46	220	7150000
417720	KANTOR UPBU LONG APUNG											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28109	IDR162.000.000.00	IDR101.094.548.00	59	795	IDR 84.000.000.00	28	420	3688000
418220	KANTOR UPBU SEHO											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jembatan	RM	Strip 28125	IDR100.000.000.00	IDR 58.800.000.00	89	420				
419221	KANTOR UPBU KAMPIL											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28107	IDR100.000.000.00	IDR 65.046.018.00	33	493				
406371	KANTOR UPBU KAMBUAYA											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28109	IDR 50.000.000.00	IDR 36.256.000.00	17	233				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Runway 28110	IDR 50.000.000.00	IDR 38.316.000.00	17	253	IDR 38.250.000.00	17	253	11200000
447285	KANTOR UPBU TICOM											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28111	IDR200.000.000.00	IDR131.093.039.00	96	990	IDR 66.047.517.00	33	693	2383961
652610	KANTOR UPBU AYAWAJU											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Runway Strip 28112	IDR100.000.000.00	IDR 75.606.000.00	36	104				
447899	KANTOR UPBU RUIH											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28113	IDR141.284.000.00	IDR 81.118.800.00	24	336	IDR 84.848.400.00	24	336	20780234
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jembatan	RM	Drainase Sidl Udara 28114	IDR 57.000.000.00	IDR 37.039.600.00	12	188	IDR 42.404.200.00	12	168	14571543
648831	KANTOR UPBU RAOF											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28115	IDR 84.000.000.00	IDR 60.000.000.00	16	340	IDR 60.000.000.00	16	340	14162163
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jembatan	RM	Drainase 28116	IDR 45.000.000.00	IDR 37.500.000.00	10	190	IDR 37.500.000.00	10	150	2680000
414010	KANTOR UPBU BANGDANERA											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar - Banda 28119	IDR 57.000.000.00	IDR 57.000.000.00	38	330				
448842	KANTOR UPBU BATOM											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28126	IDR200.000.000.00	IDR146.500.000.00	98	990	IDR 75.000.000.00	50	500	25000000
448462	KANTOR UPBU LAGALIGU											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNSP	Strip 28121	IDR 72.000.000.00	IDR 51.750.000.00	23	345	IDR 51.750.000.00	19	345	33356000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jembatan	RM	Drainase 28122	IDR 57.000.000.00	IDR 45.000.000.00	28	300	IDR 45.000.000.00	10	390	15834000
413953	KANTOR UPBU BIKINGEN											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28124	IDR215.000.000.00	IDR141.968.938.00	71	1065	IDR143.236.000.00	185	3993	3277400
414004	KANTOR UPBU BETO ANBAR											
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNSP	Strip 28124	IDR 90.000.000.00	IDR 30.000.000.00	20	240	IDR 31.500.000.00	11	230	38500000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jembatan	RM	Drainase 28127	IDR 92.000.000.00	IDR 64.125.000.00	27	113	IDR 66.800.000.00	18	432	27209000

No	Nama ERO	Nama Akun	Sumber Dana	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan	Target			Realisasi			Saluran Pendukung
						Upah	Orang	OH	Upah	Orang	OH	
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar Sisi Udara 28149	IDR 62,090,000.00	IDR 45,547,682.00	20	300	IDR 38,000,000.00	19	190	16818200
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28151	IDR 34,899,000.00	IDR 33,000,000.00	19	280				
662855 KANTOR UPBU DATAR DAWA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28152	IDR 12,000,000.00	IDR 5,270,000.00	31	31	IDR 6,900,000.00	40	40	1130000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28154	IDR 95,447,000.00	IDR 58,000,000.00	80	400	IDR 71,400,000.00	60	420	27930000
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase 28155	IDR 24,000,000.00	IDR 13,500,000.00	80	80	IDR 14,200,000.00	41	84	8660000
649048 KANTOR UPBU MAMATUA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28153	IDR 136,891,000.00	IDR 95,700,000.00	58	480	IDR 44,500,000.00	18	124	21121000
449459 KANTOR UPBU NAMROU												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28156	IDR 37,000,000.00	IDR 17,467,400.00	31	280				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	PNBP	Drainase sisi udara 28157	IDR 36,000,000.00	IDR 23,954,800.00	31	180				
449460 KANTOR UPBU JORIN BECKER												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip Bandara Klor 28159	IDR 50,000,000.00	IDR 39,000,000.00	20	284				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip Bandara Msa 28161	IDR 30,000,000.00	IDR 39,000,000.00	20	288				
649049 KANTOR UPBU MALIKUSSALEH												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28162	IDR 70,000,000.00	IDR 40,000,000.00	11	304				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Drainase 28163	IDR 25,000,000.00	IDR 12,000,000.00	8	30				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Pagar 28164	IDR 22,000,000.00	IDR 19,500,000.00	20	130				
449482 KANTOR UPBU KAWIRO												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28165	IDR 100,000,000.00	IDR 90,000,000.00	30	390				
449514 KANTOR UPBU DORO												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28166	IDR 43,000,000.00	IDR 42,000,000.00	40	280	IDR 8,200,000.00	8	34	10750000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase 28167	IDR 57,000,000.00	IDR 55,600,000.00	53	371	IDR 10,800,000.00	9	36	14250000
288168 KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OYOK												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BUJ	Strip 28168	IDR 200,000,000.00	IDR 112,067,000.00	88	394	IDR 75,000,000.00	30	420	24286000
649635 KANTOR UPBU SENDOCH												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip (PBR) 28169	IDR 15,114,000.00	IDR 18,407,000.00	15	240	IDR 35,284,000.00	18	160	14736000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase Sisi Udara 28170	IDR 75,000,000.00	IDR 46,215,514.00	77	390				
449487 KANTOR UPBU MAMINGA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28172	IDR 100,000,000.00	IDR 18,000,000.00	40	520	IDR 39,000,000.00	20	360	10840000
449488 KANTOR UPBU SLAMTARI												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase 28173	IDR 102,000,000.00	IDR 70,333,186.00	25	325				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28181	IDR 100,000,000.00	IDR 63,393,000.00	12	480				
6497491 KANTOR UPBU ILUSA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28187	IDR 100,000,000.00	IDR 44,040,014.00	33	237	IDR 78,000,000.00	23	200	90209000
612806 KANTOR UPBU KIDAR												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28188	IDR 50,000,000.00	IDR 33,025,000.00	16	247	IDR 31,200,000.00	16	204	18800000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase Sisi Udara 28189	IDR 60,000,000.00	IDR 33,025,000.00	17	248	IDR 31,700,000.00	16	204	18800000
449491 KANTOR UPBU ENALAMO												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase 28190	IDR 12,254,000.00	IDR 14,580,174.00	13	250	IDR 37,800,000.00	14	236	14158000
424097 KANTOR UPBU ENAROTAU												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28191	IDR 100,000,000.00	IDR 75,000,000.00	13	300	IDR 76,500,000.00	34	326	23100000
449492 KANTOR UPBU RITU												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Drainase 28193	IDR 56,713,000.00	IDR 36,750,000.00	35	245	IDR 36,750,000.00	35	245	18850000
449506 KANTOR UPBU KARDOPALA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar Sisi Udara 28194	IDR 72,000,000.00	IDR 45,440,000.00	58	344	IDR 39,000,000.00	65	325	10969900
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Runway Strip 28195	IDR 37,000,000.00	IDR 39,750,363.00	15	302	IDR 39,000,000.00	65	325	10969900
288533 KANTOR UPBU FRANZISKUS KAVENUS SISA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28196	IDR 57,000,000.00	IDR 42,000,000.00	35	430	IDR 42,000,000.00	35	430	11000000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28198	IDR 43,000,000.00	IDR 30,000,000.00	25	300	IDR 30,400,000.00	38	304	12000000
403487 KANTOR UPBU KUMBILE												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28200	IDR 40,238,000.00	IDR 30,000,000.00	10	180	IDR 30,000,000.00	10	180	10200000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jigasi	RM	Drainase 28201	IDR 10,000,000.00	IDR 8,000,000.00	9	42	IDR 8,000,000.00	9	42	2000000
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28204	IDR 30,000,000.00	IDR 40,000,000.00	22	225	IDR 40,000,000.00	23	180	9000000
4	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28207	IDR 35,000,000.00	IDR 30,000,000.00	20	168				
642833 KANTOR UPBU SOA DI BAJAWA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28208	IDR 50,000,000.00	IDR 30,380,000.00	15	225				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Taman dan Halaman 28212	IDR 57,000,000.00	IDR 40,385,000.00	20	300				
412947 KANTOR UPBU H. ASAH												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28214	IDR 100,000,000.00	IDR 132,080,000.00	46	990	IDR 36,000,000.00	15	300	13097440
403491 KANTOR UPBU LASONDRE												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Jalan Lingkungan 28215	IDR 30,000,000.00	IDR 33,023,000.00	17	238	IDR 36,400,000.00	17	238	
446256 KANTOR UPBU POGOGU												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Pemeliharaan Strip Bandara Pogogul 28218	IDR 50,000,000.00	IDR 33,078,250.00	16	247	IDR 33,100,000.00	16	331	10643000

No	Nama KRD	Nama Akun	Sumber Dana	Nama Kegiatan	Nilai Register	Target			Realisasi			
						Uraian	Orang	OH	Uraian	Orang	OH	Bahan Pendukung
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	STRIP (Belmug) 28258	IDR 47,858,000.00	IDR 39,375,000.00	15	225	IDR 39,375,000.00	15	225	3900000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase (Maha) 28260	IDR 36,739,000.00	IDR 89,250,000.00	84	510	IDR 75,250,000.00	49	430	11094488
411931 KANTOR UPBU TERELIAN												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Pagar 28261	IDR 34,080,000.00	IDR 8,400,000.00	56	38				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jaringan	RM	Strip 28262	IDR 33,000,000.00	IDR 11,250,000.00	73	75				
411922 KANTOR UPBU RAHADI DESMAN												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28263	IDR100,000,000.00	IDR170,000,000.00	40	680				
411900 KANTOR UPBU TUMOGU MULUNG												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28264	IDR 32,801,000.00	IDR 21,000,000.00	14	210				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28265	IDR 84,500,000.00	IDR 42,000,000.00	28	410	IDR 28,800,000.00	21	238	
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28266	IDR 15,000,000.00	IDR 10,500,000.00	7	105				
411880 KANTOR UPBU ISKANDAR												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Pemeliharaan drainase 28267	IDR 57,000,000.00	IDR 36,000,000.00	10	300				
411871 KANTOR UPBU SIBORU												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Pemeliharaan Runway Strip 28268	IDR200,000,000.00	IDR162,000,000.00	36	1080				
320344 KANTOR UPBU KANAKI												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28269	IDR 12,000,000.00	IDR 11,900,000.00	85	10				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28270	IDR 83,000,000.00	IDR 59,500,000.00	85	300				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28271	IDR 12,000,000.00	IDR 11,600,000.00	85	10				
288614 KANTOR UPBU MABIRE												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28272	IDR100,000,000.00	IDR 66,046,018.00	33	495	IDR 66,046,018.00	31	405	2404800
288600 KANTOR UPBU WAMENA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28273	IDR200,000,000.00	IDR200,000,000.00	70	800				
288602 KANTOR UPBU MOPAN												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar Sisi Udara 28274	IDR 18,380,000.00	IDR 44,000,000.00	10	280				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28275	IDR 30,000,000.00	IDR 66,000,000.00	20	800				
288571 KANTOR UPBU BENDAM												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BLU	Strip 28276	IDR200,000,000.00	IDR132,882,035.00	66	594				
288525 KANTOR UPBU TAMBOLAKA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28277	IDR 57,000,000.00	IDR 53,725,000.00	12	684	IDR 57,000,000.00	12	140	
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	PNBP	Drainase Sisi Udara 28278	IDR 11,000,000.00	IDR 69,375,000.00	12	800	IDR 67,900,000.00	12	826	
288511 KANTOR UPBU UPBU MEKANG EUMBA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28279	IDR100,000,000.00	IDR 97,500,000.00	65	975				
149400 KANTOR UPBU MIRIAMAD CAI ALI KUP												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28280	IDR 57,000,000.00	IDR 31,800,000.00	26	390	IDR 34,200,000.00	26	390	140000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	PNBP	Drainase Sisi Udara 28281	IDR115,960,000.00	IDR 80,191,351.00	20	810	IDR 80,010,000.00	20	325	31050000
288482 KANTOR UPBU SULTAN MUHAMMAD CAHARUDDIN												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	PNBP	Strip 28282	IDR100,000,000.00	IDR 66,046,018.00	33	495				
288457 KANTOR UPBU SULTAN BABULLAH												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BLU	Strip 28284	IDR241,800,000.00	IDR175,000,000.00	122	1230				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BLU	Pagar 28332	IDR170,480,000.00	IDR150,000,000.00	27	210				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BLU	Drainase 28333	IDR266,708,000.00	IDR123,445,805.00	25	1198				
288372 KANTOR UPBU AUMATA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Borang	BLU	Pemeliharaan Saluran Drainase Sisi Darat 28334	IDR200,000,000.00	IDR135,000,000.00	30	900	IDR149,850,000.00	30	800	61387000
549046 KANTOR UPBU LETUNG												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28335	IDR 34,000,000.00	IDR 150,000.00	56	130	IDR 14,400,000.00	56	96	8800000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	PNBP	Pemeliharaan Taman 28336	IDR 12,000,000.00	IDR 9,000,000.00	20	60				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28337	IDR 71,000,000.00	IDR 150,000.00	300	348	IDR 45,000,000.00	300	300	26000000
4	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28338	IDR 13,000,000.00	IDR 150,000.00	48	60	IDR 1,200,000.00	48	48	4800000
443465 KANTOR UPBU SANDA RI BANDERA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Runway Strip 28339	IDR100,000,000.00	IDR 66,046,018.00	33	495	IDR 38,330,000.00	21	430	13670000
443005 KANTOR UPBU ELUUM												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28340	IDR100,000,000.00	IDR 74,250,000.00	33	387				
288745 KANTOR UPBU AUPANGERAN TUMOGUNG PRANGTO												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BLU	Drainase 28341	IDR150,000,000.00	IDR107,750,000.00	60	715	IDR121,550,000.00	60	715	12585000
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan	BLU	Drainase 28342	IDR100,000,000.00	IDR 81,000,000.00	18	540	IDR 91,800,000.00	18	540	
411840 KANTOR UPBU GUSTI DWANGIR ALAAR												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pemeliharaan Pagar sisi darat dan sisi udara, Perda	IDR 78,000,000.00	IDR 78,000,000.00	13	390				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Strip 28615	IDR 31,000,000.00	IDR 21,600,000.00	10	110				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Drainase 28616	IDR 38,000,000.00	IDR 18,900,000.00	10	90				
651627 KANTOR UPBU NARAPUR SALEH												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pemeliharaan Pagar 28617	IDR 38,000,000.00	IDR 36,800,000.00	7	44				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Pemeliharaan Jalan 28618	IDR 28,000,000.00	IDR 26,000,000.00	6	131				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Pemeliharaan Teras 28619	IDR 46,313,000.00	IDR 46,313,000.00	12	264				

No	Nama KRO	Nama Akun	Jumlah Dana	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan	Target			Realisasi			
						Upah	Giang	DH	Upah	Giang	DH	Bahan Pendukung
[443467] KANTOR UPSU WAHA												
1	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	RM	Pagar 28822	(IDR 85,000,000.00)	(IDR 37,000,000.00)	48	240				
2	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jem	RM	Sorip 28823	(IDR 38,674,000.00)	(IDR 17,250,000.00)	44	230				
3	DM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Belanja Pemeliharaan Irigasi	RM	Dranase 28824	(IDR 85,000,000.00)	(IDR 35,000,000.00)	48	240				



E-MONITORING

MENU

Beranda

Dashboard

DIPA

Input Data

Laporan

Realisasi Per Jenis Belanja

Rekap Realisasi

Kontraktual

Matrak

Pajak Kaya

Pendapatan

Dinas: 0.002

Monev: 3.04 km



Kontraktual

Panduan Aplikasi



Beranda > Laporan > Kontraktual

Realisasi keuangan berdasarkan dari data SPN-SAKTI

Warning Untuk menjaga keamanan akun anda, harap mengaktifkan Dampak Dua Tahap (2FA). Anda dapat melakukan pada page Aktifkan 2FA

Tahun Anggaran

2026

Is. Strategis

Semua Kegiatan

🔍 View

📧 Email

DAFTAR KEGIATAN DIKONTRAKAN TAHUN 2026

Rekap data per: 6 Agu 2026 09:01:55

No	Nama Kegiatan	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Pagu Kegiatan	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa Kontrak	Jumlah			Keterangan
								Belum Kontrak	Sudah Kontrak	Total	
05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA				Rp. 1.516.107.688.000	Rp. 344.147.975.108	Rp. 210.311.964.061	Rp. 1.171.959.712.892	188	40	228	
Total Kementerian				Rp. 1.516.107.688.000	Rp. 344.147.975.108	Rp. 210.311.964.061	Rp. 1.171.959.712.892	188	40	228	

[illegible]



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

JL. BANDAR UDARA
MEDAN BARU KUALANAMU
DELI SERDANG 20552

Telepon :
061-8888 0360
061-8888 0544

Email :
otban_wil.ii@dephub.go.id
otbanwil2@gmail.com

Nomor : AU.106/389/KOBU.II/2026 14 Agustus 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Tiga halaman
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Keselamatan
dan Pelayanan Operasi *Aerodrome*

Yth. **Periksa Alamat Terlampir**

Mendasari :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor: SK-KOBU.II 2 Tahun 2026 Tentang Tim Kerja Pengawasan Terhadap Keselamatan, Keamanan, Dan Pelayanan Penerbangan Di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
3. Nota Dinas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor: 252/KOBU.II/ND/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Revisi ke-2 Jadwal Kegiatan Pengawasan Terhadap Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Penerbangan di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

dengan ini disampaikan bahwa Inspektur Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II akan melaksanakan kegiatan Pengawasan Keselamatan operasi *Aerodrome* dengan surat tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II sebagaimana lokasi dan jadwal terlampir.

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, diminta agar menyiapkan data dan informasi terkait pengoperasian dan pelayanan *aerodrome* dalam rangka pemenuhan standar keselamatan dan pelayanan serta menugaskan pejabat atau personil yang berwenang untuk mendampingi selama pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah II



Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
NIP. 197107061993011001

Tembusan:
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud.

Lampiran 1. Surat Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Nomor : AU.106/389/KOBU.II/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

Kepada Yth.

1. Direktur Politeknik Penerbangan Medan;
2. Koordinator Bandar Udara Sultan Syarif Haroen Setia Negara;
3. Kepala Kantor UPBU Letung;
4. Kepala Kantor UPBU Rembele;
5. Kepala Kantor UPBU Dabo;
6. Kepala Kantor Satuan Pelayanan Bandar Udara Sibisa.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah II



Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
NIP. 197107061993011001

Tembusan:
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud.

Lampiran 2. Surat Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Nomor : AU.106/389/KOBU.II/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

Sehubung dengan kegiatan tersebut , perlu di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengawasan Sertifikasi dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara
 - b. Akses ke dalam daerah pergerakan
 - c. Pemeliharaan daerah pergerakan
 - d. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - e. Manajemen bahaya hewan liar (*Wildlife Hazard Management*)
 - f. Alat bantu visual dan sistem kelistrikan
 - g. Pemeriksaan di daerah pergerakan dan *obstacle limitation surface*
 - h. Sistem Pelaporan
2. Ruang lingkup pengawasan Registrasi dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara
 - b. Pemeliharaan daerah pergerakan
 - c. Pemeriksaan di daerah pergerakan dan *obstacle limitation surface*
 - d. Sistem Pelaporan
 - e. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - f. Manajemen bahaya hewan liar (*Wildlife Hazard Management*)
3. Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur Bandar Udara.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah II



Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
NIP. 197107061993011001

Tembusan:
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud.

Lampiran 3. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Nomor : AU.106/389/KOBU.II/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

Jadwal Pengawasan kegiatan Pengawasan Keselamatan dan Pelayanan Operasi *Aerodrome*.

No	Bandar Udara	Inspektur Bandar Udara	Tanggal Pelaksanaan
1.	Politeknik Penerbangan Medan – Kota Medan	1. Diah Rahmiaty 2. Slamet Budi Arto 3. Rovi Hanafi	19 s.d. 22 Agustus 2026
2.	Sultan Syarif Haroen Setia Negara - Pelalawan	1. Rugun Pasaribu 2. Zulfahmi	19 s.d. 22 Agustus 2026
3.	Letung – Anambas	1. Mikha Raymond 2. Juse Damanik.	19 s.d. 22 Agustus 2026
4.	Rembele – Bener Meriah	1. Imarlia Ginting 2. Fazaruddin.	19 s.d. 22 Agustus 2026
5.	Dabo - Singkep	1. Andreas Simamora 2. Andre Pratama.	26 s.d. 29 Agustus 2026
6.	Sibisa - Ajibata	1. Sepvinolist Pardede 2. Metar Yoseplin Hutaaruk.	19 s.d. 22 Agustus 2026

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II



Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
NIP. 197107061993011001

Tembusan:
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : TI.004/793/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 14 Agustus 2026
Sifat : **Segera**
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Imbauan Kehati-hatian dalam Penyajian
Informasi pada Media Publik dan
Pelindungan Data Pribadi

Yth. Daftar Terlampir

Mendasari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta dalam rangka meningkatkan keamanan informasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan informasi publik, setiap unit kerja diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam publikasi informasi melalui portal, situs web, aplikasi maupun media sosial resmi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan seperti dokumen, foto, video, infografis, tangkapan layar (*screenshot*), maupun bentuk konten lainnya **tidak memuat data pribadi dan/atau informasi sensitif** secara berlebihan atau yang tidak diperlukan untuk kepentingan publikasi.

Adapun data dan informasi yang dilarang dipublikasikan meliputi:

1. Data pribadi, termasuk data pribadi pegawai, yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. alamat tempat tinggal;
 - e. nomor telepon dan alamat surat elektronik pribadi;
 - f. data keluarga dan tanggungan;
 - g. nomor rekening dan data keuangan pribadi;
 - h. nomor rekening, data keuangan pribadi, dan informasi transaksi keuangan;
 - i. dokumen identitas, seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor, NPWP, maupun dokumen sejenis;
 - j. tanda tangan atau spesimen tanda tangan;
 - k. data dan informasi kesehatan;
 - l. data biometrik dan genetika;
 - m. data anak;
 - n. data riwayat kepegawaian yang bersifat rinci dan tidak diperlukan untuk kepentingan publikasi;
 - o. kombinasi data lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi, verifikasi identitas, pemalsuan identitas, maupun rekayasa sosial (*social engineering*).
2. Kredensial akses dan informasi autentikasi sistem, antara lain:
 - a. nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*);
 - b. PIN dan *One-Time Password* (OTP);
 - c. *API Key*, *secret key*, *access token*, *session token*, dan kredensial elektronik lainnya;
 - d. kode QR yang mengandung informasi atau hak akses tertentu; serta
 - e. tautan yang memberikan akses langsung terhadap dokumen atau sistem yang bersifat terbatas.

3. Informasi teknis dan keamanan sistem yang bersifat terbatas, antara lain:
 - a. alamat IP internal, konfigurasi jaringan, dan topologi jaringan;
 - b. konfigurasi *server*, basis data, sistem, dan aplikasi yang tidak diperuntukkan bagi publik;
 - c. dokumentasi teknis yang memuat mekanisme akses internal;
 - d. *log* sistem, hasil pengujian keamanan, dan informasi mengenai kerentanan sistem; serta
 - e. tangkapan layar aplikasi atau sistem yang memperlihatkan informasi internal, data pribadi, atau informasi akses.
4. Dokumen dan informasi kedinasan yang tidak diperuntukkan bagi publik, termasuk dokumen internal, dokumen terbatas atau rahasia, rancangan dokumen yang belum ditetapkan, serta data dan informasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal dibatasi aksesnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada seluruh unit kerja agar:

1. melakukan pemeriksaan dan verifikasi terlebih dahulu terhadap setiap materi sebelum dipublikasikan melalui portal, website, aplikasi, dan/atau media sosial;
2. tidak mempublikasikan daftar atau profil pegawai yang memuat data pribadi dan data kepegawaian secara rinci, kecuali terdapat dasar hukum, kewenangan, dan kebutuhan yang jelas untuk mempublikasikannya;
3. memastikan dokumen seperti surat keputusan, surat tugas, daftar nominatif, daftar hadir, bahan paparan, laporan, formulir, tangkapan layar aplikasi, dan dokumen kepegawaian lainnya telah diperiksa dan tidak menampilkan data pribadi pegawai secara rinci sebelum dipublikasikan;
4. menerapkan prinsip minimalisasi data, yaitu hanya menampilkan data dan informasi yang benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan publikasi;
5. melakukan penyamaran (*masking*), pengaburan (*blurring*), pemotongan (*cropping*), atau penghilangan (*redaction*) terhadap data pribadi dan informasi sensitif yang terdapat dalam dokumen, foto, video, maupun tangkapan layar sebelum dipublikasikan;
6. memastikan dokumen yang akan diunggah telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk terhadap lampiran, metadata, kode QR, tanda tangan, tautan, dan informasi lain yang berpotensi mengungkapkan data atau akses yang tidak diperuntukkan bagi publik;
7. melakukan peninjauan kembali terhadap konten yang telah dipublikasikan melalui portal, website, dan media sosial masing-masing unit kerja dan segera melakukan penghapusan, penggantian, penyamaran, atau pembatasan akses apabila ditemukan data pribadi dan/atau informasi sensitif yang tidak seharusnya tersedia secara publik; dan
8. meningkatkan pengawasan terhadap administrator dan pengelola media publik pada masing-masing unit kerja serta memastikan proses publikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.

Perlu menjadi perhatian bahwa dokumen yang dapat disajikan kepada publik tetap harus melalui pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat bagian yang memuat data pribadi atau informasi sensitif. Apabila diperlukan, bagian tersebut agar disamarkan atau dihilangkan sebelum ditayangkan. Khusus informasi kepegawaian, penyajiannya agar dibatasi pada hal yang relevan dengan kepentingan kedinasan dan pelayanan publik serta tidak memuat rincian yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara agar secara konsisten menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 Tahun 2025 tentang Keamanan Penggunaan Komputer, Perangkat Informasi dan Komunikasi Lainnya, serta Perangkat Lunak oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam menjaga keamanan perangkat, akun, kredensial,

data, dokumen, dan informasi kedinasan serta mencegah akses, penggunaan, penyebarluasan, maupun pengungkapan informasi kepada pihak yang tidak berwenang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara

Nomor : TI.004/793/SDJ.OTL/2026

Tanggal : 14 Agustus 2026

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
4. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : TI.201/925/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 4 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyampaian Kesiapan Keberlanjutan
dan Konsistensi Penyampaian Data
Transportasi

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan Nomor TI.201/15/9/PDTI/2026 perihal Kesiapan Keberlanjutan dan Konsistensi Penyampaian Data Transportasi tanggal 31 Agustus 2026, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan penyelenggaraan transportasi nasional pada Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2026/2027, diperlukan upaya strategis yang terencana dan terintegrasi untuk menjamin peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus transportasi, seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat mendukung keberlanjutan dan konsistensi penyampaian data transportasi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dimohon untuk mengoordinasikan kesiapan di unit kerja masing-masing, serta dapat mengoordinasikan lebih lanjut ke operator transportasi dan stakeholder terkait lainnya.
3. Adapun aspek-aspek kesiapan yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Sarana dan prasarana pemantauan, antara lain kesiapan CCTV dan perangkat pendukung lainnya untuk pengamatan kondisi lapangan;
 - b. Personel yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pemantauan, pengumpulan, pemutakhiran, validasi, dan penyampaian data;
 - c. Ketersediaan dan kesinambungan data, meliputi jenis, format, periode/waktu penyampaian, frekuensi pemutakhiran, dan mekanisme penyampaian data selama periode Nataru;
 - d. Dukungan anggaran, meliputi kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan pendukung lainnya;
 - e. Kepatuhan ketentuan terhadap ketentuan yang berlaku termasuk aspek pemanfaatan, pengelolaan, keamanan, dan perlindungan data sesuai kewenangan masing-masing.
4. Hasil koordinasi dan kesiapan tersebut agar menjadi bahan untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi penyampaian data transportasi dalam mendukung pemantauan penyelenggaraan transportasi nasional selama Angkutan Nataru Tahun 2026/2027.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung keberlanjutan dan konsistensi penyampaian data transportasi dimohon kiranya unit kerja dapat mengkoordinasikan kesiapan kepada seluruh operator serta stakeholder masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat berkoordinasi dengan Narahubung tim Data dan Sistem Informasi, Sdr. Ekky (0813-8310-2950) atau Sdr. Farhan (0821-1804-0717).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : TI.201/925/SDJ.OTL/2026
Tanggal : 4 September 2026

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
3. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
4. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
5. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
6. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : PS.0/966/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 9 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penegasan Pembayaran Tunjangan
Kinerja Bagi CPNS, Peralihan Pegawai
dari CPNS ke PNS dan Perpindahan
Jabatan

Yth.

1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian khususnya terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja, dengan hormat disampaikan bahwa mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat beberapa pengaturan yang perlu ditegaskan kembali sebagai berikut:

1. Pembayaran tunjangan kinerja CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja PNS dan dibayarkan sesuai dengan penetapan SPMT, dengan kelas jabatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Sarjana/Diploma IV dan Pascasarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - b. Pendidikan Diploma III, Diploma II dan Diploma I setara dengan kelas jabatan 6 (enam);
 - c. Pendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan ke bawah setara dengan kelas jabatan 5 (lima);
2. Apabila CPNS tersebut diangkat menjadi PNS maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan TMT SK PNS dan tidak dilakukan rapel terhadap selisih 20% (dua puluh persen) yang tidak dibayarkan selama masa CPNS;
3. Jabatan yang mengalami perpindahan jabatan ke jabatan pelaksana dimana terdapat perubahan kelas jabatan maka pembayaran tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang baru sesuai dengan TMT SK pengangkatan dengan melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terlebih dahulu sesuai dengan TMT SK jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja di jabatan baru dilakukan pada periode (n+2);
4. Jabatan yang mengalami perpindahan ke Jabatan Fungsional dimana terdapat perubahan kelas jabatan maka pembayaran tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang baru sesuai dengan SPMT dan SPMJ yang TMT SK pengangkatan dengan melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terlebih dahulu sesuai dengan TMT SK jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja di jabatan baru pada periode (n+2);

5. Jabatan yang mengalami perpindahan ke Jabatan Fungsional dengan TMT bukan hari kerja pertama pada bulan berkenaan, maka perhitungan tunjangan kinerja sebagai berikut:
- Apabila jumlah hari kerja sejak awal bulan sampai dengan sebelum TMT Jabatan baru lebih sedikit daripada jumlah hari kerja sejak TMT Jabatan baru sampai dengan akhir bulan, tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan baru dapat diperhitungkan mulai bulan berkenaan dengan TMT Jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja pada periode (n+2);
 - Apabila jumlah hari kerja sejak TMT Jabatan baru sampai dengan akhir bulan lebih sedikit daripada jumlah hari kerja sejak awal bulan sampai dengan sebelum TMT Jabatan baru, tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan baru dapat diperhitungkan mulai bulan berikutnya, untuk pembayaran tunjangan kinerja pada periode (n+2);

Demikian disampaikan, mohon untuk dapat dijadikan pedoman. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

Nomor : UM.207/1635/09/DBU-2026
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Undangan Sosialisasi PR-DJPU 04
Tahun 2026 dan PR-DJPU 06 Tahun
2026 via daring

Jakarta, 10 September 2026

Yth. Alamat Terlampir

Menindaklanjuti Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.107/4161/DBU/2026 tanggal 8 September 2026 Perihal Pemberitahuan Penundaan Kegiatan Sosialisasi PR-DJPU 04 Tahun 2026 dan PR-DJPU 06 Tahun 2026, bersama ini disampaikan bahwa kegiatan yang dimaksud akan dijadwalkan kembali dan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2026
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Media : Zoom Meeting
Meeting ID : 590 590 8950
Passcode : P2DBU2026

Agenda : Sosialisasi PR-DJPU 04 Tahun 2026 dan PR-DJPU 06 Tahun
2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Direktur Bandar Udara

Budhi K Kresna
NIP. 197004111997031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri;
2. Kepala Kantor BLU UPBU Mozes Kilangin;
3. Kepala Kantor UPBU Budiarto;
4. Kepala Kantor UPBU Cut Nyak Dhien;
5. Kepala Kantor UPBU Tebelian;
6. Kepala Kantor UPBU M. Salahudin;
7. Kepala Kantor UPBU Fransiskus Xaverius Seda;
8. Kepala Kantor UPBU Umbu Mehang Kunda;
9. Kepala Kantor UPBU Komodo Labuan Bajo;
10. Kepala Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman;
11. Kepala Kantor UPBU Lede Kalumbang;
12. Kepala Kantor UPBU Rahadi Oesman;
13. Kepala Kantor UPBU H. Asan;
14. Kepala Kantor UPBU Gusti Sjamsir Alam;
15. Kepala Kantor UPBU Syukuran Aminuddin Amir;
16. Kepala Kantor UPBU Kasiguncu;
17. Kepala Kantor UPBU Douw Aturure;
18. Kepala Kantor UPBU Tampa Padang;
19. Kepala Satpel BU Singkawang;
20. Kepala Satpel BU Senggo;
21. Kepala Kantor UPBU Cakrabhuwana;
22. Kepala Satpel BU Wiriadinata;
23. Kepala Kantor UPBU Tunggul Wulung;
24. Kepala Kantor UPBU Dewadaru;
25. Kepala Satpel BU Ngloram;
26. Kepala Satpel BU Blangkejeren;
27. Kepala Satpel BU Alas Leuser;
28. Kepala Kantor UPBU Cut Ali;
29. Kepala Satpel BU Syekh Hamzah Fanshuri;
30. Kepala Kantor UPBU Lasikin;
31. Kepala Kantor UPBU Maimun Saleh;
32. Kepala Kantor UPBU Dr. Ferdinand Lumbantobing;
33. Kepala Satpel BU Sibisa;
34. Kepala Kantor UPBU Lasondre;
35. Kepala Kantor UPBU Aek Godang;
36. Kepala Satpel BU Jenderal Besar A.H Nasution;
37. Kepala Kantor UPBU Mentawai;
38. Kepala Kantor UPBU Japura;
39. Kepala Kantor UPBU Tuanku Tambusai;
40. Kepala Kantor UPBU Depati Parbo;

41. Kepala Kantor UPBU Nangapinoh;
42. Kepala Satpel BU Tira Tangka Balang;
43. Kepala Kantor UPBU Tumba Samba;
44. Kepala Kantor UPBU Sanggu;
45. Kepala Kantor UPBU Kuala Pembuang;
46. Kepala Kantor UPBU Kuala Kurun;
47. Kepala Kantor UPBU Malinau;
48. Kepala Kantor UPBU Melak;
49. Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan;
50. Kepala Kantor UPBU Yuwai Semaring;
51. Kepala Kantor UPBU Nunukan;
52. Kepala Kantor UPBU Long Ampung;
53. Kepala Kantor UPBU Datah Dawai;
54. Kepala Kantor UPBU Naha;
55. Kepala Satpel BU Sitaro;
56. Kepala Satpel BU Bolaang Mongondow;
57. Kepala Kantor UPBU Melonguane;
58. Kepala Satpel BU Miangas;
59. Kepala Kantor UPBU Sultan Bantilan;
60. Kepala Kantor UPBU Pogogul;
61. Kepala Satpel BU Panua Pohuwato;
62. Kepala Kantor UPBU Toraja;
63. Kepala Kantor UPBU Seko;
64. Kepala Kantor UPBU Rampi;
65. Kepala Kantor UPBU H. Aroeppala Selayar;
66. Kepala Kantor UPBU Andi Jemma;
67. Kepala Kantor UPBU Betoambari;
68. Kepala Kantor UPBU Sugimanuru;
69. Kepala Kantor UPBU Lagaligo;
70. Kepala Kantor UPBU Arung Palaka;
71. Kepala Kantor UPBU Matahora;
72. Kepala Kantor UPBU Sangia Nibandera;
73. Kepala Kantor UPBU Bandaneira;
74. Kepala Satpel BU Kufar;
75. Kepala Kantor UPBU Dobo;
76. Kepala Kantor UPBU Namlea;
77. Kepala Kantor UPBU John Becker;
78. Kepala Satpel BU Jos Orno Imsula;
79. Kepala Kantor UPBU Larat;
80. Kepala Kantor UPBU Namrole;
81. Kepala Kantor UPBU Amahai;
82. Kepala Kantor UPBU Wahai;
83. Kepala Kantor UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin;
84. Kepala Kantor UPBU Mali;
85. Kepala Satpel BU Kabir;

86. Kepala Kantor UPBU Gewayantana;
87. Kepala Kantor UPBU Soa;
88. Kepala Kantor UPBU A.A Bere Tallo;
89. Kepala Kantor UPBU David Constantijn Saudale;
90. Kepala Kantor UPBU Tardamu;
91. Kepala Kantor UPBU Wunopito;
92. Kepala Kantor UPBU Stevanus Rumbewas;
93. Kepala Kantor UPBU Tanah Merah;
94. Kepala Satpel BU Manggelum;
95. Kepala Satpel BU Koroway Batu;
96. Kepala Kantor UPBU Mararena;
97. Kepala Kantor UPBU Mindiptana;
98. Kepala Kantor UPBU Enarotali;
99. Kepala Kantor UPBU Waghete;
100. Kepala Kantor UPBU Mulia;
101. Kepala Kantor UPBU Tiom;
102. Kepala Kantor UPBU Kimam;
103. Kepala Kantor UPBU Kamur;
104. Kepala Kantor UPBU Bomakia;
105. Kepala Kantor UPBU Dabra;
106. Kepala Kantor UPBU Bokondini;
107. Kepala Kantor UPBU Kepi;
108. Kepala Kantor UPBU Okaba;
109. Kepala Kantor UPBU Moanamani;
110. Kepala Kantor UPBU Kokonao;
111. Kepala Kantor UPBU Numfor;
112. Kepala Kantor UPBU Karubaga;
113. Kepala Kantor UPBU Ewer;
114. Kepala Kantor UPBU Illu;
115. Kepala Kantor UPBU Bade;
116. Kepala Kantor UPBU Senggeh;
117. Kepala Kantor UPBU Batom;
118. Kepala Kantor UPBU Bilorai;
119. Kepala Kantor UPBU Ilaga;
120. Kepala Satpel BU Sinak;
121. Kepala Kantor UPBU Muko-Muko;
122. Kepala Satpel BU Enggano;
123. Kepala Kantor UPBU Osman Sadik;
124. Kepala Kantor UPBU Gamarmalamo;
125. Kepala Kantor UPBU Buli;
126. Kepala Satpel BU Gebe;
127. Kepala Kantor UPBU Kuabang;
128. Kepala Kantor UPBU Emalamo;
129. Kepala Kantor UPBU Dabo;
130. Kepala Satpel BU Tambelan;

131. Kepala Kantor UPBU Ranai;
132. Kepala Kantor UPBU Raja Haji Abdullah;
133. Kepala Kantor UPBU Siboru;
134. Kepala Kantor UPBU Bintuni;
135. Kepala Satpel BU Anggi;
136. Kepala Kantor UPBU Utarom;
137. Kepala Kantor UPBU Wasior;
138. Kepala Kantor UPBU Teminabuan;
139. Kepala Satpel BU Segun;
140. Kepala Kantor UPBU Inanwatan;
141. Kepala Kantor UPBU Marinda;
142. Kepala Kantor UPBU Merdey;
143. Kepala Kantor UPBU Babo;
144. Kepala Kantor UPBU Kambuaya;
145. Kepala Kantor UPBU Kebar;
146. Kepala Satpel BU Werur;
147. Kepala Kantor UPBU Ayawasi;
148. Kepala Satpel BU Sumarorong;
149. Kepala Kantor UPBU Elelim;
150. Kepala Satpel BU Sobaham;
151. Kepala Kantor UPBU Kiwirok;
152. Kepala Kantor UPBU Akimuga;
153. Kepala Satpel BU Muhammad Taufiq Kiemas;
154. Kepala Satpel BU Atung Bungsu;
155. Kepala Satpel BU Gatot Subroto;
156. Kepala Kantor UPBU Malikussaleh;
157. Kepala Kantor UPBU Maratua;
158. Kepala Kantor UPBU Harun Thohir;
159. Kepala Kantor UPBU Morowali;
160. Kepala Kantor UPBU Letung;
161. Kepala Kantor UPBU Muara Bungo;
162. Kepala Kantor UPBU Haji Muhammad Sidik;
163. *General Manager* KC Bandar Udara Halim Perdana Kusuma;
164. *General Manager* KC Bandar Udara Husein Sastranegara;
165. *General Manager* KC Bandar Udara Kertajati;
166. *General Manager* KC Bandar Udara Banyuwangi;
167. *General Manager* KC Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai;
168. *General Manager* KC Bandar Udara El-Tari Kupang;
169. *General Manager* KC Bandar Udara Sultan Iskandar Muda;
170. *General Manager* KC Bandar Udara Sisingamangaraja XII;
171. *General Manager* KC Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II;
172. *General Manager* KC Bandar Udara Minangkabau;
173. *General Manager* KC Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah;
174. *General Manager* KC Bandar Udara Radin Inten II;
175. *General Manager* KC Bandar Udara Sultan Thaha;

176. *General Manager* KC Bandar Udara Fatmawati Soekarno;
177. *General Manager* KC Bandar Udara Depati Amir;
178. *General Manager* KC Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin;
179. *General Manager* KC Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman;
180. *General Manager* KC Bandar Udara Adisutjipto;
181. *General Manager* KC Bandar Udara Ahmad Yani;
182. *General Manager* KC Bandar Udara Adi Soemarmo;
183. *General Manager* KC Bandar Udara Dhoho;
184. *General Manager* KC Bandar Udara Juanda;
185. *General Manager* KC Bandar Udara Sultan Hasanuddin;
186. *General Manager* KC Bandar Udara Pattimura;
187. *General Manager* KC Bandar Udara Frans Kaisiepo;
188. *General Manager* KC Bandar Udara Sentani;
189. *General Manager* KC Bandar Udara Supadio;
190. *General Manager* KC Bandar Udara Tjilik Riwut;
191. *General Manager* KC Bandar Udara SAMS Sepinggan;

Direktur Bandar Udara



Budi K Kresna

NIP. 197004111997031001

Lampiran Surat Direktur Bandar Udara

Nomor : UM.207/1635/09/DBU-2026

Tanggal : 10 September 2026

**RUNDOWN ACARA KEGIATAN
SOSIALISASI PR-DJPU 04 TAHUN 2026 DAN PR-DJPU 06 TAHUN 2026**

Waktu	Uraian Kegiatan	KET
Rabu, 16 September 2026		
08.00 - 09.15 WIB	Registrasi Peserta dan Pembukaan	Panitia dan Peserta
09.30 - 10.30 WIB	Presentasi Sosialisasi Sesi I	
10.30 - 10.45 WIB	Coffee Break	
10.45 - 12.00 WIB	Presentasi Sosialisasi Sesi II	
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 15.00 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab	
15.00 - 15.45 WIB	Coffee Break	
15.45 - 16.15 WIB	Quesioner Interaktif	
16.30 WIB	Penutupan	

Direktur Bandar Udara

Budhi K Kresna
NIP. 197604111997031001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.207/583/DJPU/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi
SKM Online Nasional di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta, 14 September 2026

Yth. (Daftar Alamat Terlampir)

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan peralihan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ke Aplikasi SKM Online Nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Aplikasi SKM Online Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu s.d. Jum'at/ 23 s.d. 25 September 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : **Luring:**

Ibis Styles Bogor Pajajaran

Jl. Raya Pajajaran No.37, RT.03/RW.08, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16128

Daring:

Meeting ID: 920 403 9145

Passcode: SKM2026

Agenda : 1. Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi SKM Online Nasional; dan
2. Diskusi, Konsultasi, dan Tindak Lanjut Implementasi SKM Online Nasional.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir atau menugaskan pegawai yang kompeten untuk mengikuti kegiatan dimaksud serta memastikan akun SKM Online Nasional telah aktif. Seluruh biaya perjalanan dinas dibebankan pada unit kerja masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi Sdri. Nina Lestari (0852 2839 0650) atau Sdr. Muhammad Rizky (0813 7257 0948) paling lambat 21 September 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran I Surat Dirjen Perhubungan Udara
Nomor : UM.207/583/DJPU/2026
Tanggal : 14 September 2026

Kepada Yth:

A. Hadir Luring:

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
3. Direktur Angkutan Udara;
4. Direktur Bandar Udara;
5. Direktur Keamanan Penerbangan;
6. Direktur Navigasi Penerbangan;
7. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
8. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
9. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
10. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
13. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
14. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
15. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
16. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
17. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
18. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
19. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
20. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
21. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto.

B. Hadir Daring:

1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata;
2. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Khusus Ibu Kota Nusantara.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran II Surat Dirjen Perhubungan Udara
Nomor : UM.207/583/DJPU/2026
Tanggal : 14 September 2026

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI APLIKASI SKM ONLINE NASIONAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.
BOGOR, 23 - 25 SEPTEMBER 2026**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Rabu, 23 September 2026		
08.30 - 09.00	Registrasi dan persiapan panitia	Panitia
09.00 - 09.30	Pembukaan dan Arahan persiapan kegiatan	Panitia
09.30 - 10.00	Coffee Break	Panitia
10.00 - 12.00	Pembahasan konsep, rundown, dan pembagian tugas panitia	Panitia
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 - 14.30	Persiapan Materi dan Teknis Pelaksanaan kegiatan	Seluruh Peserta
14.30 - 15.00	Registrasi dan Kedatangan Peserta	Seluruh Peserta
15.00 - 15.30	Coffee Break	Seluruh Peserta
15.30 - 16.30	Pengecekan akun, data unit kerja, jenis layanan, dan kesiapan perangkat peserta	Seluruh Peserta
16.30 - 17.30	Koordinasi dan pengecekan kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan kegiatan	Seluruh Peserta
17.30 - 18.30	ISHOMA	Seluruh Peserta
18.30 - 20.00	Simulasi teknis pelaksanaan kegiatan dan finalisasi pembagian tugas	Seluruh Peserta
20.00-21.00	Final briefing dan evaluasi kesiapan pelaksanaan Bimtek	Panitia
Kamis, 24 September 2026		
09.00 - 09.45	Pembukaan dan sambutan	Panitia Sesditjen Hubud
09.45 - 10.15	Coffee Break	Seluruh Peserta
10.15 - 12.00	Sosialisasi kebijakan peralihan SKM ke Aplikasi SKM Online Nasional	Narasumber: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
12.00 - 13.00	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.00 - 15.00	Bimbingan teknis pengoperasian Aplikasi SKM Online Nasional: aktivasi akun, verifikasi jenis layanan, pembuatan dan penyebaran tautan survei	Penyampaian dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana
15.00 - 15.30	Coffee Break	Seluruh Peserta
15.30 - 18.00	Simulasi penarikan rekap dan pelaporan hasil SKM, serta sesi tanya jawab dan troubleshooting	Seluruh Peserta
18.00 - 19.00	ISHOMA	Seluruh Peserta
19.00 - 20.30	Pembahasan Tindak Lanjut dan Penyusunan Rencana Aksi Unit Kerja	Seluruh Peserta
Jum'at, 25 September 2026		
09.00 - 09.30	Pembukaan dan arahan pelaksanaan kegiatan hari terakhir	Seluruh Peserta
09.30 - 10.00	Coffee Break	Seluruh Peserta
10.00 - 12.00	Review dan evaluasi hasil bimbingan teknis Aplikasi SKM Online Nasional	Seluruh Peserta
12.00 - 13.00	ISHOMA	Seluruh Peserta
13.00-15.00	Finalisasi SKM Online Nasional per unit kerja	Seluruh Peserta
15.00-15.30	Coffee Break	Seluruh Peserta
15.30-17.30	Penyusunan dan penyelesaian dokumen hasil kegiatan	Seluruh Peserta
17.30 - 18.30	ISHOMA	Seluruh Peserta
18.30 - 19.30	Evaluasi akhir dan pengecekan kelengkapan hasil kegiatan	Panitia
19.30 - 21.00	Penutupan dan final briefing hasil kegiatan	Panitia

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

Nomor : KP.109/1039/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 17 September 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pengisian Survey Kepuasan dan
Keterikatan ASN tentang Penyelenggaraan Sistem
Merit dalam Manajemen ASN

Yth. Para Direktur;
Para Kepala Bagian;
Para Kepala Balai;
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor KP.109/1/8/STJ/2026 tanggal 9 September 2026 tentang Pengisian Survey Kepuasan dan Keterikatan Pegawai ASN tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, bersama ini dengan hormat disampaikan dalam rangka survey kepuasan dan keterikatan ASN sistem merit di lingkungan Kementerian Perhubungan akan dilaksanakan survey dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon untuk dapat menugaskan para pegawai (Tingkat Manajerial, Fungsional, dan Pelaksana) untuk melakukan pengisian survey kepuasan dan keterikatan ASN dimaksud, melalui platform INAgov – Layanan Aparatur Negara, paling lambat sebelum sebelum tanggal 17 September 2026 pada link berikut: <https://layanan-smart-asn.inagov.go.id/qna/survey>

Survey diisi secara mandiri oleh ASN (PNS/PPPK) yang telah bekerja minimal 2 tahun, Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Saudara Sutriyono No HP 0821-1253-4126. Hasil Analisis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Tata Cara Pengisian Survei Kepuasan & Keterikatan Pegawai ASN

*Diisi oleh Pegawai ASN (PNS dan PPPK) pada laman/aplikasi INAgov

1. Buka INAgov

Kunjungi inagov.go.id atau unduh aplikasi INAgov di App Store / Play Store.

2. Login SSO BKN

Masuk menggunakan **username** dan **password Single Sign-On BKN**.

4. Pilih Survei & Kuis

Setelah masuk sistem, buka menu Survei & Kuis.

3. Verifikasi OTC

Masukkan **One-Time Code** dari aplikasi Authenticator di gawai.

5. Cari Survei Kepuasan

Pada tab Survei, cari "Survei Kepuasan dan Keterikatan Pegawai ASN 2026".

6. Isi Sesuai Kondisi

Jawab seluruh pertanyaan tanpa intervensi instansi, sesuai kondisi yang dirasakan.

8. Selesai — Sekali Isi

Notifikasi sukses akan tampil. Pegawai **hanya dapat mengisi survei satu kali**.

7. Kirim Jawaban

Klik "**Kirim Jawaban**" setelah seluruh pertanyaan terjawab lengkap.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

Nomor : AU.107/7/23/0BU-2026
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penilaian Tindak Lanjut Hasil
Verifikasi Genset 150 kVA dan 30 kVA
Bandar Udara Letung - Anambas

Jakarta, 31 Agustus 2026

Yth. Kepala Kantor UPBU Letung - Anambas

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor UPBU Letung - Anambas Nomor : AU.107/3/VII/UPBU-LMU/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Temuan Hasil Verifikasi Lapangan Pengadaan Genset, bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan penilaian terhadap Laporan Hasil Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan Pengadaan Genset (resume terlampir).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, disampaikan bahwa Fasilitas Bandar Udara yang dimaksud dapat direkomendasikan untuk melayani kegiatan Operasional Bandar Udara di Bandar Udara Letung - Anambas, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Hasil dari pelaksanaan Verifikasi Pengadaan Genset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
2. Masih terdapat catatan/temuan yang bersifat Mandatori (M) yang perlu ditindaklanjuti sesuai waktu yang di tentukan;
3. Pihak UPBU Letung - Anambas senantiasa melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas peralatan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

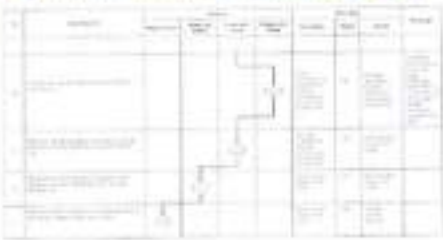
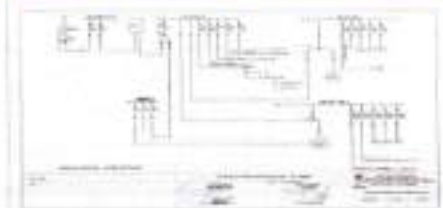
Direktur Bandar Udara

Budhi K. Kreana
NIP. 19700411 199703 1 001

Tembusan :
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wil.II Medan

**Penilaian Tindak Lanjut Verifikasi Genset 150 kVA dan 30 kVA
 di Bandar Udara Letung – Anambas**

No	Catatan Hasil Verifikasi	Saran Tindak Lanjut	Status	Tindak Lanjut	Dokumentasi	Penilaian
A.	Dokumen Peralatan					
1.	Certificate of Origin (COO) untuk Genset 150 kVA sudah tersedia namun Genset 30 kVA belum tersedia.	Untuk dapat melengkapi Certificate of Origin untuk genset 30 kVA.	M	Certificate of Origin (COO) telah tersedia untuk Genset 150kVA dan 30 kVA	M-01/LTG/P2DBU/VI/2026 <u>Certificate of Origin (COO) - Google Drive</u> 	Closed

No	Catatan Hasil Verifikasi	Saran Tindak Lanjut	Status	Tindak Lanjut	Dokumentasi	Penilaian
2.	SOP Pengoperasian dan pemeliharaan belum tersedia.	Segera dilengkapi SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan yang disahkan oleh Kepala Bandar Udara Letung	M	Flowchart SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan telah tersedia dan disahkan oleh Kepala Kantor, namun SOP Pengoperasian dan pemeliharaan belum tersedia.	M-02/LTG/P2DBU/VI/2026 SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan - Google Drive 	Open Deudate : 31 Agustus 2026
3.	Program Maintenance Genset belum tersedia.	Agar di buat program maintenance pertahun.	R	Program Maintenance Genset telah dibuat dan diketahui oleh Kepala Bandar Udara	R-01/LTG/P2DBU/VI/2026	Closed
2.	<i>As built drawing</i> tidak lengkap ditemukan beberapa catatan pada : a. Gambar Wiring Diagram belum mencerminkan kondisi aktual instalasi yang terpasang di lapangan.	Melakukan revisi pada wiring diagram untuk disesuaikan secara akurat dengan kondisi riil di lapangan, serta melengkapi Etiket Gambar Teknik pada seluruh lembar dokumen dan disahkan oleh PPK	M	a. <i>Wiring diagram</i> telah direvisi sesuai dengan kondisi aktual instalasi di lapangan.	M-03/LTG/P2DBU/VI/2026 As Built Drawing - Google Drive 	Closed

No	Catatan Hasil Verifikasi	Saran Tindak Lanjut	Status	Tindak Lanjut	Dokumentasi	Penilaian
	b. Dokumen Layout Jalur Kabel (Cable Routing) belum tersedia.	Agar dapat dibuatkan layout jalur kabel (Cable Routing).	M	b. Dokumen Layout Jalur Kabel (Cable Routing) sudah tersedia.	M-04/LTG/P2DBU/VI/2026 	Closed
B. Pemeriksaan Fisik						
1.	SISTEM KELISTRIKAN DAN CATU DAYA					
2).	Panel 250 A telah terpasang dan beroperasi, namun terdapat beberapa bagian lapisan cat yang terkelupas.	Melakukan pengecatan ulang (touch-up) pada permukaan yang terkelupas untuk mencegah terjadinya korosi/karat.	R	Telah dilakukan pengecatan pada bagian dinding panel yang terkelupas	R-02/LTG/P2DBU/VI/2026 Cat Panel 250A - Google Drive 	Closed
3).	Telah di gelar kabel tanah NYFGBY 4x120 mm ² dan 4x50 mm ² telah selesai dan beroperasi normal,	Memasang penanda jalur kabel di sepanjang jalur tanah dengan jarak		Penanda kabel telah dibuat	M-05/LTG/P2DBU/VI/2026 Penanda Jalur Kabel (Cable Marker) - Google Drive	Open Untuk dapat melengkapi

No	Catatan Hasil Verifikasi	Saran Tindak Lanjut	Status	Tindak Lanjut	Dokumentasi	Penilaian
	namun terdapat catatan diantaranya : a. sepanjang jalur kabel belum dilengkapi dengan penanda jalur (cable marker).	maksimal setiap 60 meter serta menambahkan penanda khusus pada setiap titik perubahan arah (belokan) kabel. 	M			dengan arah panah untuk menunjukkan arah kabel serta menggunakan huruf yang bersifat permanen dan mudah dibaca  Ref. PR DJPU 04 Tahun 2026 Deudate : 31 Agustus 2026
	b. Terdapat kabel yang tergelar di atas permukaan lantai beton selasar tanpa pelindung (conduit). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan akibat cuaca, mesin potong rumput, dan beban mekanis lainnya, serta dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki.	Agar dapat memasang conduit pada kabel yang berada diatas permukaan lantai.	M	Pemasangan conduit pada kabel yang berada diatas permukaan lantai	M-06/LTG/P2DBU/VI/2026 <u>Pelindung Kabel (Conduit) - Google Drive</u> 	Closed

No	Catatan Hasil Verifikasi	Saran Tindak Lanjut	Status	Tindak Lanjut	Dokumentasi	Penilaian
	Grounding telah terpasang namun tidak terdapat bak kontrol	Agar dapat membuat bak kontrol guna mempermudah pemeliharaan dan pengujian nilai resistansi secara berkala.	R		R-03/LTG/P2DBU/VI/2026 Bak Kontrol Grounding - Google Drive 	Closed

Tim Verifikasi



Andi Legan Mardika
NIP. 198406192018011002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG - ANAMBAS**

Bukit Padi
Kec. Jemaja Timur
Kode Pos 29792

Telp. :
Fax :
Sms Center :

TDX :
E-mail :
Web-Site :

:
:Bandaraupbuletung@gmail.com
:

Nomor : AU.107/3/VII/UPBU-LMU/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Temuan Hasil
Verifikasi Lapangan Pengadaan Genset

Bukit Padi, 08 Juli 2026

Yth. Direktur Bandar Udara

Menindaklanjuti Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.107/6/3/DBU-2026 tanggal 15 Juni 2026, tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan Pengadaan Genset di Bandar Udara Letung - Anambas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat terlampir disampaikan tindak lanjut temuan hasil Verifikasi Lapangan Pengadaan Genset dengan kapasitas 150 kVA dan 30 kVA di Bandar Udara Letung - Anambas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas III Letung - Anambas,



Denny Armanto, S.E., M.A.

NIP. 197711262007121001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan